



**BUPATI GRESIK**  
**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 35 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 memiliki kesamaan pemahaman baik dari segi perencanaan sampai pengoperasiannya sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas dan pembangunan, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapa/tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014.**

#### **Pasal 1**

- 1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014.
- 2) Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 18 September 2013

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 18 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1254



## **BUPATI GRESIK**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. POKOK-POKOK PENYUSUNAN RKA-SKPD**

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik tahun anggaran 2014, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun RKA-SKPD dan bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun RKA-PPKD dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RKA-SKPD dan RKA-PPKD disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014;
2. SKPD dan PPKD harus memperhatikan sinkronisasi antara KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD agar terwujud APBD yang terpadu dari seluruh kegiatan dan program dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
3. Setiap RKA menggambarkan rangkaian pekerjaan yang akan dilakukan pada Program/Kegiatan;
4. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD;
5. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
6. Pagu anggaran yang tertera pada PPAS adalah pagu anggaran tertinggi yang dapat diusulkan melalui RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Didalamnya sudah termasuk pagu anggaran untuk program dan kegiatan yang dibiayai oleh

dana yang bersumber dari DAK, BHPCHT, dan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

## **B. TEKNIS PENYUSUNAN RKA-SKPD**

### **I. UMUM**

1. RKA-SKPD dan RKA-PPKD disusun dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
2. Program/Kegiatan dan pagu anggaran disesuaikan dengan PPAS;
3. Indikator kinerja, Tolak ukur kinerja dan target kinerja kegiatan pada pada setiap RKA diisi dengan lengkap, terukur secara kuantitatif serta sesuai dengan belanja yang dialokasikan;
4. Penggunaan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada setiap RKA harus sesuai peruntukannya dan dilakukan sinkronisasi antara kode rekening yang digunakan dengan program dan kegiatan dimaksud;
5. Daftar kode rekening yang ditunakan dalam penyusunan RKA sebagaimana tercantum dalam Bab II lampiran Peraturan Bupati ini;
6. Dalam hal terdapat kode rekening yang belum ditampung Peraturan Bupati ini, SKPD dapat mengusulkan secara tertulis kepada PPKD guna menampung rekening rekening dimaksud, selanjutnya DPPKAD menelaah kode rekening dan menginput dalam data master SIPKD;
7. Penganggaran dana BOS Daerah bagi sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada belanja langsung dinas Pendidikan, sedangkan dana BOS Daerah bagi sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah pada belanja tidak langsung;
8. Penganggaran BOS Daerah untuk sekolah negeri diuraikan secara lengkap sampai dengan uraian rincian obyek;
9. Anggaran RSUD Ibnu Sina yang berasal dari pendapatan dan surplus BLUD disusun dalam format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Selanjutnya di konsolidasikan ke RKA di rinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja. Penyusunan dan Penyampaian RBA mengacu pada jadwal penyusunan RKA SKPD;
10. Penentuan Besaran Harga yang digunakan untuk memberikan honorarium kepada PNSD, CPNSD dan Tenaga Honorer Daerah serta membayar jasa kepada tenaga Non PNSD akibat dari pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam BAB III lampiran Peraturan Bupati ini;
11. Penentuan besaran harga satuan barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor : 050/985/HK/437.12/2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2013.
12. RKA-SKPD yang telah disusun dan disampaikan kepada PPKD akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk evaluasi dan ditelaah kesesuaiannya dengan semua dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;

13. Dalam melakukan analisa dan evaluasi terhadap RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibantu oleh Tim Verifikasi Anggaran Pemerintah Daerah;
14. SKPD wajib melampirkan Surat Rekomendasi Kepala SKPD untuk Belanja Hibah dan Bansos.

## II. KHUSUS

### 1. PENDAPATAN

Setiap SKPD penghasil Pendapatan menganggarkan Pendapatan Daerah sebagaimana dokumen PPAS.

### 2. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD dihitung berdasarkan realisasi gaji dan tunjangan bulan September Tahun 2013 dikalikan 13, kecuali untuk tunjangan Beras dan Tambahan Penghasilan dikalikan 12;
- b. Untuk mengantisipasi rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan tahun 2014 agar memperhitungkan rencana kenaikan tersebut sebesar 6% (enam persen), sedangkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, Penganggaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan PPh, Tunjangan Beras agar memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 1,5% (satu koma lima persen) untuk SKPD yang Pagu Belanja Pegawai diatas 2 Milyar dan 2.5% (dua koma lima persen) untuk SKPD Yang Belanja Pagarainya dibawah 2 Milyar;
- c. Penganggaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pengaturan penghitungan gaji PAPBD.

### 3. BELANJA LANGSUNG

- a. Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung hanya digunakan untuk memberi honorarium kepada PNS, CPNS, dan Tenaga Honorer Daerah (K-2) yang masuk dalam database Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. Penggunaan Tenaga Non PNS diluar huruf a. atau tenaga ahli/narasumber/instruktur dianggarkan dalam belanja barang dan jasa;
- c. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan. Pemberian honorarium bagi PNS

dibatasi dan didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan;

- d. Penganggaran pemeliharaan rutin/berkala/perbaikan aset dengan kriteria tidak menambah kapasitas dan kualitas aset sebagaimana diatur Peraturan Bupati Gresik yang mengatur tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja pemeliharaan;
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2013;
- f. Penganggaran penyediaan dan pemeliharaan peralatan dan mesin yang tercatat pada belanja modal dipusatkan pada sekretariat SKPD;
- g. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada rekening Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga dan dijabarkan rincian rencana penerimanya dalam penjelasan rincian obyek;
- h. Penganggaran huruf e) diatas dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- i. Penganggaran Belanja Modal Aset Tetap Berwujud dianggarkan dalam belanja modal berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap;
- j. Biaya Kegiatan Belanja Modal non Konstruksi dan Konsultasi non Konstruksi, terdiri dari:
  1. Biaya Pengelolaan, meliputi Administrasi Proyek, Proses Pengadaan Langsung dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
  2. Biaya Perencanaan, meliputi Perencanaan Non Konstruksi, Studi, Penelitian, dan Pengkajian.
- k. Biaya pengelolaan kegiatan belanja modal konstruksi bangunan gedung sederhana dan non konstruksi gedung (dikonstrakkan) ditentukan harga tertinggi dengan perincian sesuai tabel E1: Daftar biaya komponen kegiatan pembangunan gedung negara klasifikasi sederhana Permen PU 45/PRT/M/2007;
- l. Biaya pengelolaan dalam kegiatan Belanja modal konstruksi bangunan tidak sederhana/khusus aturannya mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Tabel E2 dan E3).

**BAB II**  
**KODE REKENING DALAM APBD 2014**

**A. KODE REKENING URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
1.	URUSAN WAJIB	
1.01.	PENDIDIKAN	
1.02.	KESEHATAN	
1.03.	PEKERJAAN UMUM	
1.04.	PERUMAHAN	
1.05.	PENATAAN RUANG	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1.07.	PERHUBUNGAN	
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	
1.09.	PERTANAHAN	
1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	
1.13.	SOSIAL	
1.14.	KETENAGAKERJAAN	
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
1.16.	PENANAMAN MODAL	
1.17.	KEBUDAYAAN	
1.18.	PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
1.21.	KETAHANAN PANGAN	
1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1.23.	STATISTIK	
1.24.	KEARSIPAN	
1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.26.	PERPUSTAKAAN	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
2.	URUSAN PILIHAN	
2.01.	PERTANIAN	
2.02.	KEHUTANAN	
2.03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
2.04.	PARIWISATA	
2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.06.	PERDAGANGAN	
2.07.	PERINDUSTRIAN	
2.08.	KETRANSMIGRASIAN	

## B. KODE REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
1 01 01	DINAS PENDIDIKAN	
1 02 01	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	RSUD IBNU SINA	
1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1 06 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
1 07 01	DINAS PERHUBUNGAN	
1 08 01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	
1 10 01	DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN SOSIAL	
1 10 02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1 12 01	BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1 13 01	DINAS SOSIAL	
1 13 02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 14 01	DINAS TENAGA KERJA	
1 15 01	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1 16 01	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	
1 17 01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
1 19 01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1 19 02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 20 01	DPRD	
1 20 02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
1 20 03	SEKRETARIAT DAERAH	
1 20 03 01	BAGIAN PERLENGKAPAN	
1 20 03 02	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
1 20 03 03	BAGIAN HUKUM	
1 20 03 04	BAGIAN HUMAS	
1 20 03 05	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
1 20 03 06	BAGIAN UMUM	
1 20 03 07	BAGIAN ADMINISTRASI SDA	
1 20 03 08	BAGIAN PDTI	
1 20 03 09	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA	
1 20 03 10	BAGIAN ORTALA	
1 20 03 11	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
1 20 04	SEKRETARIAT DPRD	
1 20 05	INSPEKTORAT DAERAH	
1 20 06	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1 20 07	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
1 20 08	KECAMATAN GRESIK	
1 20 09	KECAMATAN KEBOMAS	
1 20 10	KECAMATAN MANYAR	
1 20 11	KECAMATAN CERME	
1 20 12	KECAMATAN BENJENG	
1 20 13	KECAMATAN BALONG PANGGANG	
1 20 14	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	
1 20 15	KECAMATAN DRIYOREJO	
1 20 16	KECAMATAN WRINGINANOM	
1 20 17	KECAMATAN KEDAMEAN	
1 20 18	KECAMATAN MENGANTI	
1 20 19	KECAMATAN SIDAYU	
1 20 20	KECAMATAN UJUNG PANGKAH	
1 20 21	KECAMATAN PANCENG	
1 20 22	KECAMATAN BUNGAH	
1 20 23	KECAMATAN DUKUN	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
1 20 24	KECAMATAN SANGKAPURA	
1 20 25	KECAMATAN TAMBAK	
1 20 26	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI	
1 21 01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	
1 22 01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1 26 01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2 01 01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	
2 01 02	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	
2 05 01	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	

### C. KODE REKENING PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
<b>4.1.1.</b>	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	Sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.1.01.	<b>Pajak Hotel</b>	
4.1.1.01.01.	<i>Hotel Bintang Lima Berlian</i>	
4.1.1.01.02.	<i>Hotel Bintang Lima</i>	
4.1.1.01.03.	<i>Hotel Bintang Empat</i>	
4.1.1.01.04.	<i>Hotel Bintang Tiga</i>	
4.1.1.01.05.	<i>Hotel Bintang Dua</i>	
4.1.1.01.06.	<i>Hotel Bintang Satu</i>	
4.1.1.01.07.	<i>Hotel Melati Tiga</i>	
4.1.1.01.08.	<i>Hotel Melati Dua</i>	
4.1.1.01.09.	<i>Hotel Melati Satu</i>	
4.1.1.01.10.	<i>Motel</i>	
4.1.1.01.11.	<i>Cottage</i>	
4.1.1.01.12.	<i>Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos</i>	
4.1.1.01.13.	<i>Wisma Pariwisata</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.1.01.14.	<i>Hotel ekonomi</i>	
4.1.1.01.15.	<i>dst.....</i>	
4.1.1.01.22.	<i>Pelepasan Aset Daerah</i>	
4.1.1.02.	<b>Pajak Restoran</b>	
4.1.1.02.01.	<i>Restoran</i>	
4.1.1.02.02.	<i>Rumah Makan</i>	
4.1.1.02.03.	<i>Café</i>	
4.1.1.02.04.	<i>Kantin</i>	
4.1.1.02.05.	<i>Katering</i>	
4.1.1.02.06.	<i>Warung</i>	
4.1.1.02.07.	<i>Depot</i>	
4.1.1.02.08.	<i>Dst.....</i>	
4.1.1.03.	<b>Pajak Hiburan</b>	
4.1.1.03.01.	<i>Tontonan Film/Bioskop/TV kabel</i>	
4.1.1.03.02.	<i>Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana</i>	
4.1.1.03.03.	<i>Kontes Kecantikan</i>	
4.1.1.03.04.	<i>Kontes Binaraga</i>	
4.1.1.03.05.	<i>Pameran</i>	
4.1.1.03.06.	<i>Diskotik</i>	
4.1.1.03.07.	<i>Karaoke</i>	
4.1.1.03.08.	<i>Klub Malam</i>	
4.1.1.03.09.	<i>Sirkus/Akrobat/Sulap</i>	
4.1.1.03.10.	<i>Permainan Biliar</i>	
4.1.1.03.11.	<i>Permainan Golf</i>	
4.1.1.03.12.	<i>Permainan Bowling</i>	
4.1.1.03.13.	<i>Pacuan Kuda</i>	
4.1.1.03.14.	<i>Balap Kendaraan Bermotor</i>	
4.1.1.03.15.	<i>Permainan Ketangkasan</i>	
4.1.1.03.16.	<i>Panti Pijat/Refleksi</i>	
4.1.1.03.17.	<i>Mandi Uap/Spa</i>	
4.1.1.03.18.	<i>Pusat Kebugaran</i>	
4.1.1.03.19.	<i>Pertandingan Olahraga</i>	
4.1.1.03.20.	<i>Kolam Renang</i>	
4.1.1.03.21.	<i>Hiburan dunia anak</i>	
4.1.1.03.22.	<i>Hiburan Lainnya</i>	
4.1.1.04.	<b>Pajak Reklame</b>	
4.1.1.04.01.	<i>Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.1.04.02.	<i>Reklame Kain</i>	
4.1.1.04.03.	<i>Reklame Melekat/ Stiker</i>	
4.1.1.04.04.	<i>Reklame Selebaran</i>	
4.1.1.04.05.	<i>Reklame Berjalan</i>	
4.1.1.04.06.	<i>Reklame Udara</i>	
4.1.1.04.07.	<i>Reklame Apung</i>	
4.1.1.04.08.	<i>Reklame Suara</i>	
4.1.1.04.09.	<i>Reklame Film/ Slide</i>	
4.1.1.04.10.	<i>Reklame Peragaan</i>	
4.1.1.04.11.	<i>Dst.....</i>	
4.1.1.05.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	
4.1.1.05.01.	<i>Pajak Penerangan Jalan PLN</i>	
4.1.1.05.02.	<i>Pajak Penerangan Jalan Non PLN</i>	
4.1.1.05.03.	<i>Dst..</i>	
4.1.1.06.	<b>Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C</b>	<i>Dihapus</i>
4.1.1.06.01.	<i>Asbes</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.1.06.02.	<i>Batu Tulis</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.1.06.03.	<i>Batu setengah permata</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.1.06.04.	<i>Batu Kapur</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.1.06.05.	<i>Batu Apung</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.1.06.06.	<i>Dst.....</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.1.07.	<b>Pajak Parkir</b>	
4.1.1.07.01.	<i>Pajak Parkir.</i>	
4.1.1.07.02.	<i>Dst.....</i>	
4.1.1.08.	<b>Pajak Air Bawah tanah</b>	
4.1.1.08.01.	<i>Pajak Air Bawah tanah.</i>	
4.1.1.08.02.	<i>Dst.....</i>	
4.1.1.09.	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	
4.1.1.09.01.	<i>Pajak Sarang Burung Walet.</i>	
4.1.1.09.02.	<i>Dst.....</i>	
4.1.1.10.	<b>Pajak Air Tanah</b>	
4.1.1.10.01.	<i>Pajak Air Tanah.</i>	
4.1.1.10.02.	<i>Dst.....</i>	
4.1.1.11.	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan</b>	
4.1.1.11.04.	<i>Batu Kapur</i>	
4.1.1.12.	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.</b>	
4.1.1.12.01.	<i>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.1.13.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.</b>	
4.1.1.13.01.	<i>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i>	
<b>4.1.2.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	
4.1.2.01.	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<i>Sebagaimana Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum</i>
4.1.2.01.01.	<i>Retribusi Pelayanan Kesehatan</i>	
4.1.2.01.02.	<i>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</i>	
4.1.2.01.03.	<i>Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil</i>	
4.1.2.01.04.	<i>Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.01.05.	<i>Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum</i>	
4.1.2.01.06.	<i>Retribusi Pelayanan Pasar</i>	
4.1.2.01.07.	<i>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</i>	
4.1.2.01.08.	<i>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.01.09.	<i>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.01.10.	<i>Retribusi Pelayanan Pendidikan</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.01.11.	<i>Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.01.12.	<i>Retribusi Bina Upah Minimum Syaker dan Hubin</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.01.13.	<i>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</i>	
4.1.2.02.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<i>Sebagaimana Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</i>
4.1.2.02.01.	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	
4.1.2.02.02.	<i>Retribusi Pasar</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.02.03.	<i>Retribusi Tempat Pelelangan</i>	
4.1.2.02.04.	<i>Retribusi Terminal</i>	
4.1.2.02.05.	<i>Retribusi Tempat Khusus Parkir</i>	
4.1.2.02.06.	<i>Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.02.07.	<i>Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus</i>	<i>Dihapus</i>

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.2.02.08.	<i>Retribusi Rumah Potong Hewan</i>	
4.1.2.02.09.	<i>Retribusi Pelayanan Kepelabuhan</i>	
4.1.2.02.10.	<i>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</i>	
4.1.2.02.11.	<i>Retribusi Penyeberangan di Air</i>	
4.1.2.02.12.	<i>Retribusi Pengolahan Limbah Cair</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.02.13.	<i>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<i>Sebagaimana Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu</i>
4.1.2.03.01.	<i>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</i>	
4.1.2.03.02.	<i>Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.03.	<i>Retribusi Izin Gangguan</i>	
4.1.2.03.04.	<i>Retribusi Izin Trayek</i>	
4.1.2.03.05.	<i>Retribusi Izin Usaha Perikanan</i>	
4.1.2.03.06.	<i>Retribusi Rumah Makan ( Heregristasi )</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.07.	<i>Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.08.	<i>Retribusi Ijin PMA - PMDN</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.09.	<i>Retribusi Ijin Non PMA - PMDN</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.10.	<i>Retribusi Ijin Pendirian Depot lokal untuk sarana pengisian dan Pendistribusian BBM</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.11.	<i>Retribusi Ijin Galian C</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.12.	<i>Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi / SIUJK</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.13.	<i>Retribusi Ijin Pemanfaatan Tanah Pengairan</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.14.	<i>Retribusi Ijin Bidang Kesehatan</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.15.	<i>Retribusi Ijin Penempatan dan Perluasan Kerja</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.16.	<i>Retribusi Ijin Penebangan Kayu Hutan Rakyat</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.17.	<i>Retribusi Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.18.	<i>Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.19.	<i>Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG)</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.20.	<i>Retribusi Ijin Industri</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.21.	<i>Retribusi Ijin Pemanfaatan ABT-AP</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.22.	<i>Retribusi Ijin Kelistrikan / Penyediaan Tenaga Listrik</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.23.	<i>Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.24.	<i>Retribusi ijin usaha SPBU</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.25.	<i>Retribusi Ijin Penanaman Modal</i>	<i>Dihapus</i>

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.2.03.23.	<i>Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.24.	<i>Retribusi ijin usaha SPBU</i>	<i>Dihapus</i>
4.1.2.03.25.	<i>Retribusi Ijin Penanaman Modal</i>	<i>Dihapus</i>
<b>4.1.3.</b>	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	
4.1.3.01.	<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	
4.1.3.01.01.	<i>Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)</i>	
4.1.3.01.02.	<i>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Bank Gresik)</i>	
4.1.3.01.03.	<i>PT Gresik Migas</i>	
4.1.3.01.04.	<i>Dst...</i>	
4.1.3.02.	<b>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</b>	
4.1.3.02.01.	<i>PT Bank Jatim</i>	
4.1.3.02.02.	<i>PT BPR Jatim</i>	
4.1.3.03.	<i>Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta</i>	
4.1.3.03.01.	<i>Perusahaan .....</i>	
4.1.3.03.02.	<i>Dst.....</i>	
<b>4.1.4.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	
4.1.4.01.	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</b>	
4.1.4.01.01.	<i>Pelepasan Hak Atas Tanah</i>	
4.1.4.01.02.	<i>Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai</i>	
4.1.4.01.03.	<i>Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai</i>	
4.1.4.01.04.	<i>Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas</i>	
4.1.4.01.05.	<i>Penjualan Kendaraan Dinas roda dua</i>	
4.1.4.01.06.	<i>Penjualan Kendaraan Dinas roda empat</i>	
4.1.4.01.07.	<i>Penjualan Drum Bekas</i>	
4.1.4.01.08.	<i>Penjualan Hasil Penebangan Pohon</i>	
4.1.4.01.09.	<i>Penjualan Lampu Hias Bekas</i>	
4.1.4.01.10.	<i>Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan</i>	
4.1.4.01.11.	<i>Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas</i>	
4.1.4.01.12.	<i>Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi</i>	
4.1.4.01.13.	<i>Penjualan hasil pertanian</i>	
4.1.4.01.14.	<i>Penjualan hasil kehutanan</i>	
4.1.4.01.15.	<i>Penjualan hasil perkebunan</i>	
4.1.4.01.16.	<i>Penjualan hasil peternakan</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.4.01.17.	<i>Penjualan hasil perikanan</i>	
4.1.4.01.18.	<i>Penjualan hasil sitaan</i>	
4.1.4.01.19.	<i>Penjualan stand pasar</i>	
4.1.4.01.20.	<i>Usaha bidang perhubungan</i>	
4.1.4.01.21.	<i>Usaha Koperasi</i>	
4.1.4.01.22.	<i>Pelepasan Aset Daerah</i>	
4.1.4.02.	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	
4.1.4.02.01.	<i>Jasa Giro Kas Daerah</i>	
4.1.4.02.02.	<i>Jasa Giro Pemegang Kas</i>	
4.1.4.02.03.	<i>Jasa Giro Dana Cadangan</i>	
4.1.4.02.04.	<i>Dst.....</i>	
4.1.4.03.	<b>Pendapatan Bunga deposito</b>	
4.1.4.03.01.	<i>Rekening Deposito pada Bank Jatim</i>	
4.1.4.03.02.	<i>Rekening Deposito pada BTN Bukit Darmo</i>	
4.1.4.03.03.	<i>Rekening Deposito Pada BNI Gresik</i>	
4.1.4.03.04.	<i>Rekening Deposito Pada BSM Kediri</i>	
4.1.4.03.05.	<i>Rekening Deposito pada Bank BRI</i>	
4.1.4.03.06.	<i>Dst.....</i>	
4.1.4.04.	<b>Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	
4.1.4.04.01.	<i>Kerugian Uang</i>	
4.1.4.04.02.	<i>Kerugian Barang</i>	
4.1.4.04.03.	<i>Dst.....</i>	
4.1.4.05.	<b>Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah</b>	
4.1.4.05.01.	<i>Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah</i>	
4.1.4.05.02.	<i>Penerimaan Potongan dari ....</i>	
4.1.4.05.03.	<i>Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari .....</i>	
4.1.4.05.04.	<i>Dst.....</i>	
4.1.4.06.	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	
4.1.4.06.01.	<i>Bidang Pendidikan</i>	
4.1.4.06.02.	<i>Bidang Kesehatan</i>	
4.1.4.06.03.	<i>Bidang Pekerjaan Umum</i>	
4.1.4.06.04.	<i>Bidang Perumahan Rakyat</i>	
4.1.4.06.05.	<i>Bidang Penataan Ruang</i>	
4.1.4.06.06.	<i>Bidang Perencanaan Pembangunan</i>	
4.1.4.06.07.	<i>Bidang Perhubungan</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.4.06.08.	<i>Bidang Lingkungan Hidup</i>	
4.1.4.06.09.	<i>Bidang Pertanahan</i>	
4.1.4.06.10.	<i>Kependudukan dan Catatan Sipil</i>	
4.1.4.06.11.	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>	
4.1.4.06.12.	<i>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</i>	
4.1.4.06.13.	<i>Sosial</i>	
4.1.4.06.14.	<i>Ketenagakerjaan</i>	
4.1.4.06.15.	<i>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</i>	
4.1.4.06.16.	<i>Penanaman Modal</i>	
4.1.4.06.17.	<i>Kebudayaan</i>	
4.1.4.06.18.	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>	
4.1.4.06.19.	<i>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</i>	
4.1.4.06.20.	<i>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian</i>	
4.1.4.06.21.	<i>Ketahanan Pangan</i>	
4.1.4.06.22.	<i>Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	
4.1.4.06.23.	<i>Statistik</i>	
4.1.4.06.24.	<i>Kearsipan</i>	
4.1.4.06.25.	<i>Komunikasi dan Informatika</i>	
4.1.4.06.26.	<i>Perpustakaan</i>	
4.1.4.06.27.	<i>Pertanian</i>	
4.1.4.06.28.	<i>Kehutanan</i>	
4.1.4.06.29.	<i>Energi dan Sumberdaya Mineral</i>	
4.1.4.06.30.	<i>Pariwisata</i>	
4.1.4.06.31.	<i>Kelautan dan Perikanan</i>	
4.1.4.06.32.	<i>Perdagangan</i>	
4.1.4.06.33.	<i>Industri</i>	
4.1.4.06.34.	<i>Ketransmigrasian</i>	
4.1.4.07.	<b>Pendapatan Denda Pajak</b>	
4.1.4.07.01.	<i>Pendapatan Denda Pajak Hotel</i>	
4.1.4.07.02.	<i>Pendapatan Denda Pajak Restoran</i>	
4.1.4.07.03.	<i>Pendapatan Denda Pajak Hiburan</i>	
4.1.4.07.04.	<i>Pendapatan Denda Pajak Reklame</i>	
4.1.4.07.05.	<i>Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan</i>	
4.1.4.07.06.	<i>Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</i>	
4.1.4.07.07.	<i>Pendapatan Denda Pajak Parkir</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.4.07.08.	<i>Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah</i>	
4.1.4.07.09.	<i>Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet</i>	
4.1.4.07.10.	<i>Pendapatan Denda Pajak Lingkungan</i>	
4.1.4.07.11.	<i>Dst.....</i>	
4.1.4.08.	<b>Pendapatan Denda Retribusi</b>	
4.1.4.08.01.	<i>Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum</i>	
4.1.4.08.02.	<i>Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha</i>	
4.1.4.08.03.	<i>Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu</i>	
4.1.4.08.04.	<i>Dst.....</i>	
4.1.4.09.	<b>Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan</b>	
4.1.4.09.01.	<i>Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan</i>	
4.1.4.09.02.	<i>Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame</i>	
4.1.4.09.03.	<i>Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman</i>	
4.1.4.09.04.	<i>Dst.....</i>	
4.1.4.10.	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	
4.1.4.10.01.	<i>Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	
4.1.4.10.02.	<i>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan</i>	
4.1.4.10.03.	<i>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>	
4.1.4.10.04.	<i>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas</i>	
4.1.4.10.05.	<i>Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka</i>	
4.1.4.10.06.	<i>Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya</i>	
4.1.4.11.	<b>Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</b>	
4.1.4.11.01.	<i>Fasilitas Sosial</i>	
4.1.4.11.02.	<i>Fasilitas Umum</i>	
4.1.4.11.03.	<i>Donasi Pihak ketiga</i>	
4.1.4.11.04.	<i>Bea cetak nota pajak</i>	
4.1.4.11.05.	<i>Penggantian bea cetak karcis</i>	
4.1.4.12.	<b>Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	
4.1.4.12.01.	<i>Uang Pendaftaran/Ujian Masuk</i>	
4.1.4.12.02.	<i>Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan</i>	
4.1.4.12.03.	<i>Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.1.4.12.04.	<i>Uang Pengembangan / pembangunan Gedung</i>	
4.1.4.12.05.	<i>Uang Asrama</i>	
4.1.4.13.	<b>Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah</b>	
4.1.4.13.01.	<i>Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah</i>	
4.1.4.13.02.	<i>Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan</i>	
4.1.4.13.03.	<i>Dst.....</i>	
4.1.4.14.	<b>Penerimaan Dari Dana Bergulir</b>	
4.1.4.14.01.	<i>Sapi Kereman dan IB</i>	
4.1.4.14.02.	<i>Usaha Pertanian</i>	
4.1.4.15.	<b>Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah</b>	
4.1.4.15.01.	<i>Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum</i>	
4.1.4.16	<b>Pendapatan Bidang Perhubungan</b>	
4.1.4.16.01.	<i>Usaha Bidang Perhubungan</i>	
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<i>Rekening PPKD</i>
<b>4.2.1.</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK/HASIL BUKAN PAJAK</b>	
4.2.1.01.	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	
4.2.1.01.01.	<i>Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan</i>	
4.2.1.01.02.	<i>Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i>	
4.2.1.01.03.	<i>Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21</i>	
4.2.1.01.04.	<i>Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau</i>	
4.2.1.02.	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	
4.2.1.02.01.	<i>Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan</i>	
4.2.1.02.02.	<i>Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan</i>	
4.2.1.02.03.	<i>Bagi Hasil dari Dana Reboisasi</i>	
4.2.1.02.04.	<i>Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)</i>	
4.2.1.02.05.	<i>Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)</i>	
4.2.1.02.06.	<i>Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan</i>	
4.2.1.02.07.	<i>Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan</i>	
4.2.1.02.08.	<i>Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi</i>	
4.2.1.02.09.	<i>Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi</i>	
4.2.1.02.10.	<i>Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi</i>	
4.2.1.02.11.	<i>Bagi Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan</i>	

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.2.1.02.12.	<i>Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum</i>	
4.2.1.02.13.	<i>Pemberian Hak Atas Tanah Negara</i>	
<b>4.2.2.</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	
4.2.2.01.	<b>Dana Alokasi Umum</b>	
4.2.2.01.01.	<i>Dana Alokasi Umum.</i>	
<b>4.2.3.</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>	
4.2.3.01.	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	
4.2.3.01.01.	<i>Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan.</i>	
4.2.3.01.02.	<i>Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan</i>	
4.2.3.01.03.	<i>Dana alokasi khusus Bidang Infrastruktur Jalan</i>	
4.2.3.01.04.	<i>Dana alokasi khusus Bidang Infrastruktur Irigasi</i>	
4.2.3.01.05.	<i>Dana alokasi khusus Bidang Infrastruktur Air Bersih</i>	
4.2.3.01.06.	<i>Dana alokasi khusus Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	
4.2.3.01.07.	<i>Dana alokasi khusus Bidang Pertanian</i>	
4.2.3.01.08.	<i>Dana alokasi khusus Bidang Lingkungan</i>	
4.2.3.01.09.	<i>Dana alokasi khusus Bidang Prasarana Pemerintahan</i>	
4.2.3.01.10.	<i>Dana alokasi khusus Bidang Kependudukan</i>	
4.2.3.01.11.	<i>Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana</i>	
4.2.3.01.12.	<i>Dana Alokasi Khusus Kehutanan</i>	
4.2.3.01.13.	<i>Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sanitasi</i>	
4.2.3.01.14.	<i>Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi</i>	
4.2.3.01.15.	<i>Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman</i>	
4.2.3.01.16.	<i>Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan</i>	
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<i>Rekening PPKD</i>
<b>4.3.1.</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	
4.3.1.01.	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>	
4.3.1.01.01.	<i>Pemerintah</i>	
4.3.1.02.	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya</b>	
4.3.1.02.01.	<i>Pemerintah Daerah</i>	
4.3.1.02.02.	<i>Dst.....</i>	
4.3.1.03.	<b>Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri</b>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.3.1.04.	<b>Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan</b>	
4.3.1.04.01.	<i>Kelompok masyarakat/perorangan .....</i>	
4.3.1.04.02.	<i>Dst.....</i>	
4.3.1.05.	<b>Pendapatan Hibah dari Luar Negeri</b>	
4.3.1.05.01.	<i>Pendapatan Hibah dari Bilateral</i>	
4.3.1.05.02.	<i>Pendapatan Hibah dari Multilateral</i>	
4.3.1.05.03.	<i>Pendapatan Hibah dari Donor lainnya</i>	
4.3.1.05.04.	<i>Dst.....</i>	
<b>4.3.2.</b>	<b>DANA DARURAT</b>	
4.3.2.01.	<b>Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam</b>	
4.3.2.01.01.	<i>Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam .....</i>	
4.3.2.01.02.	<i>Dst.....</i>	
<b>4.3.3.</b>	<b>DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI</b>	
4.3.3.01.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	
4.3.3.01.01.	<i>Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor</i>	
4.3.3.01.02.	<i>Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air</i>	
4.3.3.01.03.	<i>Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</i>	
4.3.3.01.04.	<i>Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air</i>	
4.3.3.01.05.	<i>Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>	
4.3.3.01.06.	<i>Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah</i>	
4.3.3.01.07.	<i>Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan</i>	
4.3.3.01.08.	<i>Dst.....</i>	
4.3.3.02.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 3)</b>	
4.3.3.02.01.	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi .....</i>	
4.3.3.02.02.	<i>Dst.....</i>	
4.3.3.03.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3)</b>	
4.3.3.03.01.	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .....</i>	
4.3.3.03.02.	<i>Dst.....</i>	
4.3.3.04.	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota 3)</b>	
4.3.3.04.01.	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota .....</i>	
4.3.3.04.02.	<i>Dst.....</i>	
4.3.3.05.	<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi</b>	
4.3.3.05.01.	<i>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari RP3HH</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.3.3.05.02.	<i>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari IKTA</i>	
4.3.3.05.03.	<i>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Tera</i>	
4.3.3.05.04.	<i>Sumbangan Pihak III dari Pembelian Kayu</i>	
<b>4.3.4.</b>	<b>DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS</b>	
4.3.4.01.	<b>Dana Penyesuaian</b>	
4.3.4.01.01.	<i>Bidang Pendidikan</i>	
4.3.4.01.02.	<i>Bidang Kesehatan</i>	
4.3.4.01.03.	<i>Bidang Jalan dan Jembatan</i>	
4.3.4.01.04.	<i>Bidang Irigasi / Normalisasi Sungai Atau Pantai</i>	
4.3.4.01.05.	<i>Bidang Air Bersih</i>	
4.3.4.01.06.	<i>Bidang Kesehatan</i>	
4.3.4.01.07.	<i>Bidang Pertanian/Perkebunan</i>	
4.3.4.01.08.	<i>Bidang Perhubungan/Transportasi</i>	
4.3.4.01.09.	<i>Bidang Perdagangan</i>	
4.3.4.01.10.	<i>Bidang Prasarana Pemerintah Daerah</i>	
4.3.4.01.11.	<i>Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan</i>	
4.3.4.01.12.	<i>Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	
4.3.4.01.13.	<i>Bidang Bandara Perintis</i>	
4.3.4.01.14.	<i>Tambahan Penghasilan Guru PNSD</i>	
4.3.4.01.15.	<i>Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah</i>	
4.3.4.01.16.	<i>Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah</i>	
4.3.4.01.17.	<i>Dana Bos</i>	
4.3.4.02.	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	
4.3.4.02.01.	<i>Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan</i>	
4.3.4.02.02.	<i>Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan</i>	
4.3.4.02.03.	<i>Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah</i>	
4.3.4.03.	<b>Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah.</b>	
4.3.4.03.01.	<i>Bidang Infrastruktur jalan dan jembatan</i>	
4.3.4.03.02.	<i>Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan</i>	
4.3.4.03.03.	<i>Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah</i>	
4.3.4.04.	<b>Dana Insentif Daerah</b>	
4.3.4.04.01.	<i>Dana Insentif Daerah.</i>	
<b>4.3.5.</b>	<b>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>	
4.3.5.01.	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
4.3.5.01.01.	<i>Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur</i>	
4.3.5.01.02.	<i>Dst.....</i>	
4.3.5.02.	<b>Bantuan keuangan dari kabupaten</b>	
4.3.5.02.01.	<i>Bantuan keuangan dari Kabupaten.....</i>	
4.3.5.02.02.	<i>Dst.....</i>	
4.3.5.03.	<b>Bantuan keuangan dari kota</b>	
4.3.5.03.01.	<i>Bantuan keuangan dari Kota .....</i>	
4.3.5.03.02.	<i>Dst.....</i>	

#### D. KODE REKENING BELANJA DAERAH

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	
5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	
5.1.1.01.	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	
5.1.1.01.01.	<i>Gaji Pokok PNS/Uang Representasi</i>	
5.1.1.01.02.	<i>Tunjangan Keluarga</i>	
5.1.1.01.03.	<i>Tunjangan Jabatan</i>	
5.1.1.01.04.	<i>Tunjangan Fungsional</i>	
5.1.1.01.05.	<i>Tunjangan Fungsional Umum</i>	
5.1.1.01.06.	<i>Tunjangan Beras</i>	
5.1.1.01.07.	<i>Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus</i>	
5.1.1.01.08.	<i>Pembulatan Gaji</i>	
5.1.1.01.09.	<i>Iuran Asuransi Kesehatan</i>	
5.1.1.01.10.	<i>Uang Paket</i>	
5.1.1.01.11.	<i>Tunjangan Badan Musyawarah</i>	
5.1.1.01.12.	<i>Tunjangan Komisi</i>	
5.1.1.01.13.	<i>Tunjangan Badan Anggaran</i>	
5.1.1.01.14.	<i>Tunjangan Badan Kehormatan</i>	
5.1.1.01.15.	<i>Tunjangan Alat Kelengkapan</i>	
5.1.1.01.16.	<i>Tunjangan Perumahan</i>	
5.1.1.01.17.	<i>Uang Duka Wafat/Tewas</i>	
5.1.1.01.18.	<i>Uang Jasa Pengabdian</i>	
5.1.1.01.19.	<i>Belanja penunjang OPRS Pimpinan DPRD</i>	
5.1.1.01.20.	<i>Tunjangan Badan Legislasi</i>	

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.1.1.02.	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	
5.1.1.02.01.	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja</i>	
5.1.1.02.02.	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas</i>	
5.1.1.02.03.	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja</i>	
5.1.1.02.04.	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi</i>	
5.1.1.02.05.	<i>Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja</i>	
5.1.1.02.06.	<i>Tambahan penghasilan berupa uang makan</i>	
5.1.1.02.07.	<i>Tunjangan Profesi Guru PNSD</i>	
5.1.1.02.08.	<i>Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD</i>	
5.1.1.03.	<b>Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH</b>	
5.1.1.03.01.	<i>Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	
5.1.1.03.02.	<i>Belanja Penunjang Operasional KDH/ WKDH</i>	
5.1.1.04.	<b>Biaya Pemungutan Pajak</b>	
5.1.1.04.01.	<i>Biaya pemungutan PBB</i>	
5.1.1.04.02.	..	
5.1.1.05.	<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>	
5.1.1.05.01.	<i>Insentif Pemungutan Pajak Daerah.</i>	
5.1.1.06.	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	
5.1.1.06.01.	<i>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.</i>	
<b>5.1.2.</b>	<b>BELANJA BUNGA</b>	
5.1.2.01.	<b>Bunga Utang Pinjaman</b>	
5.1.2.01.01.	<i>Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah</i>	
5.1.2.01.02.	<i>Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya</i>	
5.1.2.01.03.	<i>Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank</i>	
5.1.2.01.04.	<i>Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank</i>	
5.1.2.01.05.	<i>Bungan Utang kepada Pihak Ketiga (Pelaksana Kegiatan)</i>	
5.1.2.02.	<b>Bunga Utang Obligasi</b>	
5.1.2.02.01.	<i>Bunga Utang Obligasi</i>	
5.1.2.02.02.	<i>Dst.....</i>	
<b>5.1.3.</b>	<b>BELANJA SUBSIDI</b>	
5.1.3.01.	<b>Belanja Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga</b>	
5.1.3.01.01.	<i>Belanja Subsidi kepada Perusahaan.....</i>	

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.1.3.01.02.	<i>Belanja Subsidi Kepada Lembaga.....</i>	
<b>5.1.4.</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>	
5.1.4.01.	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	
5.1.4.01.01.	<i>Pemerintah Pusat</i>	
5.1.4.01.02.	<i>Hibah Kepada Instansi vertikal</i>	
5.1.4.02.	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya<sup>3)</sup></b>	
5.1.4.02.01.	<i>Pemerintah Provinsi.</i>	
5.1.4.02.02.	<i>Pemerintah Kabupaten / Kota</i>	
5.1.4.03.	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa</b>	
5.1.4.03.01.	<i>Pemerintahan Desa ....</i>	
5.1.4.04.	<b>Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)</b>	
5.1.4.04.01.	<i>Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)</i>	
5.1.4.04.02.	<i>PD BPR Bank Gresik</i>	
5.1.4.04.03.	<i>PT Gresik Migas</i>	
5.1.4.05.	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>	
5.1.4.05.01.	<i>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi.</i>	
5.1.4.05.02.	.....	
5.1.4.06.	<b>Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat</b>	
5.1.4.06.01.	<i>Belanja Hibah Kelompok/anggota masyarakat</i>	
5.1.4.07.	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	
5.1.4.07.01.	<i>Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta</i>	<i>Tidak digunakan</i>
5.1.4.07.02.	<i>Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta</i>	<i>Tidak digunakan</i>
5.1.4.08.	<b>Belanja Dana BOS Daerah</b>	
5.1.4.08.01.	<i>Belanja Hibah Dana BOS Daerah</i>	
5.1.4.09.	<b>Belanja Hibah Dana Bos Provinsi.</b>	
5.1.4.09.01.	<i>Belanja Hibah Dana Bos Provinsi</i>	
<b>5.1.5.</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>	
5.1.5.01.	<b>Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan</b>	
5.1.5.01.01.	<i>Belanja bantuan sosial organisasi sosial kemasyarakatan.</i>	
5.1.5.01.02.	<i>Belanja Bantuan Sosial / Santunan Kemasyarakatan</i>	
5.1.5.02.	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat</b>	
5.1.5.02.01.	<i>Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat</i>	

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.1.5.03.	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat</b>	
5.1.5.03.01.	<i>Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat</i>	
5.1.5.05.	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Pihak Ketiga</b>	
5.1.5.05.01.	<i>Belanja Bantuan Sosial Kepada Pihak Ketiga.</i>	
<b>5.1.6.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	
5.1.6.01.	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi</b>	
5.1.6.01.01.	<i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi ...</i>	
5.1.6.01.02.	<i>Dst.....</i>	
5.1.6.02.	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>	
5.1.6.02.01.	<i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/ Kota ...</i>	
5.1.6.03.	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>	
5.1.6.03.01.	<i>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa ...</i>	
5.1.6.03.02.	<i>Dst.....</i>	
5.1.6.04.	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota</b>	
5.1.6.04.01.	<i>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/ Kota ....</i>	
5.1.6.04.02.	<i>Dst.....</i>	
5.1.6.05.	<b>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa</b>	
5.1.6.05.01.	<i>Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa ....</i>	
5.1.6.05.02.	<i>Dst.....</i>	
<b>5.1.7.</b>	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KEPADA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK</b>	
5.1.7.01.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi</b>	
5.1.7.01.01.	<i>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi .....</i>	
5.1.7.01.02.	<i>Dst.....</i>	
5.1.7.02.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota</b>	
5.1.7.02.01.	<i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota .....</i>	
5.1.7.02.02.	<i>Dst.....</i>	
5.1.7.03.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.1.7.03.01.	<i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.</i>	
5.1.7.03.02.	<i>Dst.</i>	
5.1.7.04.	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya</b>	
5.1.7.04.01.	<i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ...</i>	
5.1.7.04.02.	<i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota .....</i>	
5.1.7.04.03.	<i>Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa ...</i>	
5.1.7.04.04.	<i>Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan</i>	
5.1.7.05.	<b>Belanja Bantuan Partai Politik</b>	
5.1.7.05.01.	<i>Bantuan Partai Politik Hati Nurani Rakyat</i>	
5.1.7.05.02.	<i>Bantuan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya</i>	
5.1.7.05.03.	<i>Bantuan Partai Politik Keadilan dan Persatuan Indonesia</i>	
5.1.7.05.04.	<i>Bantuan Partai Politik Amanat Nasional</i>	
5.1.7.05.05.	<i>Bantuan Partai Politik Kebangkitan Bangsa</i>	
5.1.7.05.06.	<i>Bantuan Partai Politik Golongan Karya</i>	
5.1.7.05.07.	<i>Bantuan Partai Politik Persatuan Pembangunan</i>	
5.1.7.05.08.	<i>Bantuan Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan</i>	
5.1.7.05.09.	<i>Bantuan Partai Politik Demokrat</i>	
5.1.7.05.10.	<i>Bantuan Partai Politik Kebangkitan Nasional Ulama</i>	
5.1.7.05.11.	<i>Bantuan Partai Politik Buruh</i>	
5.1.7.05.12.	<i>Dst</i>	
<b>5.1.8.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	
5.1.8.01.	<b>Belanja Tidak Terduga.</b>	
5.1.8.01.01.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	
5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>	<i>Digunakan untuk memberikan honorarium kepada PNS dan CPNS dilingkup Pemerintah Daerah Kab. Gresik</i>
5.2.1.01.01.	<i>Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan</i>	
5.2.1.01.02.	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</i>	

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.2.1.01.03.	<i>Honorarium Peserta PNS</i>	
5.2.1.01.04.	<i>Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS</i>	
5.2.1.01.05.	<i>Honorarium Tim Anggaran</i>	
5.2.1.01.06.	<i>Honorarium Tim Legislasi</i>	
5.2.1.01.07.	<i>Honorarium Tim Teknis Kegiatan</i>	
5.2.1.01.08.	<i>Honorarium Pengelola Keuangan SKPD</i>	
5.2.1.01.09.	<i>Honorarium Pengelola Barang SKPD</i>	
5.2.1.01.10.	<i>Honorarium Tim Pelaksana Pengawasan Internal</i>	<i>Hanya untuk Inspektorat</i>
5.2.1.01.11.	<i>Honorarium Tim Penanganan Kasus Pengaduan</i>	<i>Hanya untuk Inspektorat</i>
5.2.1.01.12.	<i>Honorarium Tim Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH</i>	<i>Hanya untuk Inspektorat</i>
5.2.1.01.13.	<i>Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</i>	<i>Hanya untuk Inspektorat</i>
5.2.1.01.14.	<i>Honorarium Tim Reviu Atas laporan keuangan daerah</i>	<i>Hanya untuk Inspektorat</i>
5.2.1.02.	<b>Honorarium Non PNS</b>	<i>Digunakan untuk memberikan honorarium kepada Pegawai Non PNS yang terdaftar dalam data base kepegawaian BKN/ K2</i>
5.2.1.02.01.	<i>Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber</i>	
5.2.1.02.02.	<i>Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap</i>	
5.2.1.02.03.	<i>Honorarium Peserta Non PNS</i>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.1.02.04.	<i>Honorarium Tim Teknis Kegiatan Non PNS</i>	
5.2.1.02.05.	<i>Dst...</i>	
5.2.1.03.	<b>Uang Lembur</b>	
5.2.1.03.01.	<i>Uang Lembur PNS</i>	
5.2.1.03.02.	<i>Uang Lembur Non PNS</i>	<i>Digunakan untuk memberikan uang lembur kepada Pegawai Non PNS yang terdaftar dalam data base kepegawaian BKN/ K2</i>

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5.2.1.04.	<b>Honorarium Pengelolaan Dana Bos</b>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.1.04.01.	<i>Honorarium Pengelolaan Dana Bos</i>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.1.05.	<b>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.1.05.01.	<i>Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga.</i>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.1.05.02.	<i>Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat</i>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.1.06.	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	
5.2.1.06.01.	<i>Belanja Pegawai BLUD RSUD</i>	
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	
5.2.2.01.	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	
5.2.2.01.01.	<i>Belanja alat tulis kantor</i>	
5.2.2.01.02.	<i>Belanja dokumen/ administrasi tender</i>	
5.2.2.01.03.	<i>Belanja alat listrik dan elektronik</i>	
5.2.2.01.04.	<i>Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya</i>	
5.2.2.01.05.	<i>Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	
5.2.2.01.06.	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</i>	
5.2.2.01.07.	<i>Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran</i>	
5.2.2.01.08.	<i>Belanja pengisian tabung gas</i>	
5.2.2.01.09.	<i>Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih</i>	
5.2.2.01.10.	<i>Belanja alat - alat kesehatan</i>	
5.2.2.01.11.	<i>Belanja peralatan/perengkapan rumah tangga/kantor</i>	
5.2.2.02.	<b>Belanja Bahan/Material</b>	
5.2.2.02.01.	<i>Belanja bahan baku bangunan</i>	
5.2.2.02.02.	<i>Belanja bahan/bibit tanaman</i>	
5.2.2.02.03.	<i>Belanja bibit ternak</i>	
5.2.2.02.04.	<i>Belanja bahan obat-obatan</i>	
5.2.2.02.05.	<i>Belanja bahan kimia</i>	
5.2.2.02.06.	<i>Belanja bahan praktek/percontohan</i>	
5.2.2.02.07.	<i>Belanja bahan makanan/minuman</i>	
5.2.2.02.08.	<i>Belanja Kelengkapan Peralatan Kerja</i>	
5.2.2.02.09.	<i>Belanja bahan Radiologi</i>	
5.2.2.02.10.	<i>Belanja Perlengkapan Peserta</i>	
5.2.2.02.11.	<i>Belanja Peralatan dan perlengkapan Olah Raga</i>	
5.2.2.02.12.	<i>Belanja Bahan Publikasi</i>	
5.2.2.02.13.	<i>Belanja Dekorasi</i>	
5.2.2.02.14.	<i>Belanja Dokumentasi</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.2.02.15.	<i>Belanja Bahan Bacaan</i>	
5.2.2.02.16.	<i>Belanja Peralatan Pertamanan, Pertanian dan Peternakan</i>	
5.2.2.02.17.	<i>Dst.....</i>	
5.2.2.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	
5.2.2.03.01.	<i>Belanja Telepon</i>	
5.2.2.03.02.	<i>Belanja Air</i>	
5.2.2.03.03.	<i>Belanja Listrik</i>	
5.2.2.03.04.	<i>Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang</i>	
5.2.2.03.05.	<i>Belanja surat kabar/ majalah</i>	
5.2.2.03.06.	<i>Belanja kawat/faksimili/ internet</i>	
5.2.2.03.07.	<i>Belanja pengiriman</i>	
5.2.2.03.08.	<i>Belanja Sertifikasi</i>	
5.2.2.03.09.	<i>Belanja Jasa Transaksi Keuangan</i>	
5.2.2.03.10.	<i>Belanja Jasa Kebersihan</i>	
5.2.2.03.11.	<i>Belanja Jasa Administrasi Pungutan PPJU</i>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.2.03.12.	<i>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan</i>	
5.2.2.03.13.	<i>Belanja Jasa Perijinan</i>	
5.2.2.03.14.	<i>Belanja Jasa Publikasi</i>	
5.2.2.03.15.	<i>Belanja Jasa Rias</i>	
5.2.2.03.16.	<i>Belanja Jasa Koreksi Lembar Jawaban</i>	
5.2.2.03.17.	<i>Belanja Jasa Pelayanan Jamkesmasda</i>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.2.03.18.	<i>Belanja Pendaftaran</i>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.2.03.20.	<i>Belanja Jasa Pengolahan Buku</i>	<i>Tidak Digunakan</i>
5.2.2.03.21.	<i>Belanja Jasa Pembantu Administrasi Kantor</i>	
5.2.2.03.22.	<i>Belanja Jasa Hiburan</i>	
5.2.2.03.24.	<i>Belanja Jasa Sopir</i>	
5.2.2.03.25.	<i>Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli</i>	
5.2.2.03.26.	<i>Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah</i>	
5.2.2.03.27.	<i>Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah</i>	
5.2.2.03.28.	<i>Belanja Jasa Lembur Pekerjaan</i>	
5.2.2.03.29.	<i>Belanja Jasa Keamanan</i>	
5.2.2.03.30.	<i>Belanja Jasa Kesehatan</i>	
5.2.2.03.31.	<i>Belanja Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan</i>	
5.2.2.03.32.	<i>Belanja Jasa Event Organiser</i>	
5.2.2.04.	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	
5.2.2.04.01.	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)</i>	
5.2.2.04.02.	<i>Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.2.04.03.	<i>Belanja Premi Asuransi Jamsostek</i>	
5.2.2.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	
5.2.2.05.01.	<i>Belanja Jasa Service</i>	
5.2.2.05.02.	<i>Belanja Penggantian Suku Cadang</i>	
5.2.2.05.03.	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas</i>	
5.2.2.05.04.	<i>Belanja Jasa KIR</i>	
5.2.2.05.05.	<i>Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan</i>	
5.2.2.05.06.	<i>Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi</i>	<i>Tidak digunakan</i>
5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	
5.2.2.06.01.	<i>Belanja cetak</i>	
5.2.2.06.02.	<i>Belanja Penggandaan</i>	
5.2.2.07.	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir</b>	
5.2.2.07.01.	<i>Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas</i>	
5.2.2.07.02.	<i>Belanja sewa gedung/kantor/tempat</i>	
5.2.2.07.03.	<i>Belanja sewa ruang rapat/pertemuan</i>	
5.2.2.07.04.	<i>Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas</i>	
5.2.2.07.05.	<i>Belanja Sewa Lahan /tanah</i>	
5.2.2.08.	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	
5.2.2.08.01.	<i>Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat</i>	
5.2.2.08.02.	<i>Belanja sewa Sarana Mobilitas Air</i>	
5.2.2.08.03.	<i>Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara</i>	
5.2.2.09.	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>	
5.2.2.09.01.	<i>Belanja sewa Eskavator</i>	
5.2.2.09.02.	<i>Belanja sewa Bulldoser</i>	
5.2.2.09.03.	<i>Belanja Sewa wales</i>	
5.2.2.09.04.	<i>Belanja Sewa Vibro roller</i>	
5.2.2.09.05.	<i>Belanja Sewa Loader</i>	
5.2.2.09.06.	<i>Belanja Sewa Finisher</i>	
5.2.2.09.07.	<i>Belanja Sewa Crane</i>	
5.2.2.09.08.	<i>Belanja Sewa Tractor</i>	
5.2.2.09.09.	<i>Belanja Sewa Dump truk</i>	
5.2.2.09.10.	<i>Belanja Sewa Mesin pengolah semen</i>	
5.2.2.09.11.	<i>Belanja Sewa Ponton</i>	
5.2.2.09.12.	<i>Belanja Sewa Alat Berat khusus</i>	
5.2.2.10.	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	
5.2.2.10.01.	<i>Belanja sewa meja kursi</i>	
5.2.2.10.02.	<i>Belanja sewa komputer dan printer</i>	
5.2.2.10.03.	<i>Belanja sewa proyektor</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.2.10.04.	<i>Belanja sewa generator</i>	
5.2.2.10.05.	<i>Belanja sewa tenda</i>	
5.2.2.10.06.	<i>Belanja sewa pakaian adat/tradisional</i>	
5.2.2.10.07.	<i>Belanja sewa Sound Sistem/ audio visual</i>	
5.2.2.10.08.	<i>Belanja sewa Panggung/lighting</i>	
5.2.2.10.09.	<i>Belanja Sewa peralatan kebersihan kantor</i>	
5.2.2.10.10.	<i>Belanja Sewa AC</i>	
5.2.2.10.11.	<i>Belanja Sewa Alat Olahraga</i>	
5.2.2.10.12.	<i>Belanja Sewa Mesin Fotocopy</i>	
5.2.2.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	
5.2.2.11.01.	<i>Belanja makanan dan minuman harian pegawai</i>	
5.2.2.11.02.	<i>Belanja makanan dan minuman rapat / Kegiatan</i>	
5.2.2.11.03.	<i>Belanja makanan dan minuman tamu</i>	
5.2.2.11.04.	<i>Belanja makanan dan minuman pasien</i>	
5.2.2.12.	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	
5.2.2.12.01.	<i>Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH</i>	
5.2.2.12.02.	<i>Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)</i>	
5.2.2.12.03.	<i>Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)</i>	
5.2.2.12.04.	<i>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</i>	
5.2.2.12.05.	<i>Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)</i>	
5.2.2.12.06.	<i>Belanja Pakaian Sipil Resmi ( PSR )</i>	
5.2.2.12.50.	<i>Belanja Atribut</i>	
5.2.2.13.	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	
5.2.2.13.01.	<i>Belanja pakaian kerja lapangan</i>	
5.2.2.13.02.	<i>Dst.....</i>	
5.2.2.14.	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	
5.2.2.14.01.	<i>Belanja pakaian KORPRI</i>	
5.2.2.14.02.	<i>Belanja pakaian adat daerah</i>	
5.2.2.14.03.	<i>Belanja pakaian batik tradisional</i>	
5.2.2.14.04.	<i>Belanja pakaian olahraga</i>	
5.2.2.14.05.	<i>Belanja pakaian pentas dan seni</i>	
5.2.2.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	
5.2.2.15.01.	<i>Belanja perjalanan dinas dalam daerah</i>	
5.2.2.15.02.	<i>Belanja perjalanan dinas luar daerah</i>	
5.2.2.15.03.	<i>Belanja perjalanan dinas Ke Luar Negeri</i>	
5.2.2.15.04.	<i>Belanja perjalanan Dinas Non PNS</i>	
5.2.2.16.	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	
5.2.2.16.01.	<i>Belanja beasiswa tugas belajar D1/D2/D3</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.2.16.02.	<i>Belanja beasiswa tugas belajar S1/D4</i>	
5.2.2.16.03.	<i>Belanja beasiswa tugas belajar S2</i>	
5.2.2.16.04.	<i>Belanja beasiswa tugas belajar S3</i>	
5.2.2.17.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan Pameran</b>	
5.2.2.17.01.	<i>Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan</i>	
5.2.2.17.02.	<i>Belanja sosialisasi ( workshop, simposium, lokakarya, seminar )</i>	
5.2.2.17.03.	<i>Belanja bimbingan teknis</i>	
5.2.2.18.	<b>Belanja Perjalanan Pindah Tugas</b>	
5.2.2.18.01.	<i>Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah</i>	
5.2.2.18.02.	<i>Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah</i>	
5.2.2.19.	<b>Belanja Pemulangan Pegawai</b>	
5.2.2.19.01.	<i>Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah</i>	
5.2.2.19.02.	<i>Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah</i>	
5.2.2.19.03.	<i>Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas</i>	
5.2.2.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	
5.2.2.20.01.	<i>Belanja pemeliharaan jalan</i>	
5.2.2.20.02.	<i>Belanja pemeliharaan jembatan</i>	
5.2.2.20.03.	<i>Belanja pemeliharaan alat-alat bengkel</i>	
5.2.2.20.04.	<i>Belanja pemeliharaan alat pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, pertambangan, ESDM dan kehutanan</i>	
5.2.2.20.05.	<i>Belanja pemeliharaan peralatan kantor</i>	
5.2.2.20.06.	<i>Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor</i>	
5.2.2.20.07.	<i>Belanja pemeliharaan komputer</i>	
5.2.2.20.08.	<i>Belanja pemeliharaan mebeulair</i>	
5.2.2.20.09.	<i>Belanja pemeliharaan peralatan rumah tangga</i>	
5.2.2.20.10.	<i>Belanja pemeliharaan penghias ruangan</i>	
5.2.2.20.11.	<i>Belanja pemeliharaan alat-alat studio</i>	
5.2.2.20.12.	<i>Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi</i>	
5.2.2.20.13.	<i>Belanja Pemeliharaan alat-alat ukur</i>	
5.2.2.20.14.	<i>Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran/ kesehatan</i>	
5.2.2.20.15.	<i>Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium</i>	
5.2.2.20.16.	<i>Belanja pemeliharaan Tanah</i>	
5.2.2.20.17.	<i>Belanja pemeliharaan Alat-Alat Berat</i>	
5.2.2.20.18.	<i>Belanja pemeliharaan jaringan/ instalasi air, saluran irigasi, waduk dan drainase</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.2.20.19.	<i>Belanja pemeliharaan taman dan persampahan</i>	
5.2.2.20.20.	<i>Belanja pemeliharaan komponen jalan</i>	
5.2.2.20.21.	<i>Belanja pemeliharaan instalasi/jaringan listrik, telephon, gas dan air bersih</i>	
5.2.2.20.22.	<i>Belanja pemeliharaan gedung</i>	
5.2.2.20.23.	<i>Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan dan barang perpustakaan</i>	
5.2.2.20.24.	<i>Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan dan olah raga</i>	
5.2.2.20.25.	<i>Belanja pemeliharaan hewan/ternak dan tanaman</i>	
5.2.2.20.26.	<i>Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan</i>	
5.2.2.20.27.	<i>Belanja pemeliharaan menara</i>	
5.2.2.20.28.	<i>Belanja pemeliharaan monumen</i>	
5.2.2.20.29.	<i>Belanja pemeliharaan makam/TMP</i>	
5.2.2.20.30.	<i>Belanja pemeliharaan pengolahan limbah</i>	
5.2.2.20.31.	<i>Belanja Pemeliharaan Alat Publikasi</i>	
5.2.2.20.32.	<i>Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/ Kantor</i>	
5.2.2.21.	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	
5.2.2.21.01.	<i>Belanja jasa konsultansi penelitian</i>	
5.2.2.21.02.	<i>Belanja jasa konsultansi perencanaan</i>	
5.2.2.21.03.	<i>Belanja jasa konsultansi pengawasan</i>	
5.2.2.21.04.	<i>Belanja jasa konsultansi penyusunan software/plikasi komputer</i>	
5.2.2.21.05.	<i>Belanja jasa konsultansi studi kelayakan</i>	
5.2.2.21.06.	<i>Belanja jasa konsultansi penyusunan standarisasi</i>	
5.2.2.21.07.	<i>Belanja jasa konsultansi hukum</i>	
5.2.2.21.08.	<i>Belanja Jasa Konsultansi Pemetaan Wilayah</i>	
5.2.2.21.09.	<i>Belanja Jasa Konsultansi Visualisasi</i>	
5.2.2.21.10.	<i>Belanja Jasa Konsultansi Penilaian Aset</i>	
5.2.2.21.11.	<i>Belanja jasa konsultansi Keuangan</i>	
5.2.2.21.12.	<i>Belanja Jasa Konsultansi Pendidikan</i>	
5.2.2.21.13.	<i>Belanja Jasa Konsultansi Penilaian SDM</i>	
5.2.2.21.14.	<i>Belanja Jasa Konsultansi swakelola dengan Instansi Pemerintah Lainnya</i>	
5.2.2.22.	<b>Belanja Barang Dana Bos</b>	<i>Tidak digunakan</i>
5.2.2.22.01.	<i>Belanja Barang Dana Bos</i>	<i>Tidak digunakan</i>
5.2.2.23.	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga/ Desa</b>	
5.2.2.23.01.	<i>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat..</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.2.23.02.	<i>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga</i>	
5.2.2.23.03.	<i>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Desa</i>	
5.2.2.24.	<b>Belanja Barang Yang Akan Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	
5.2.2.24.01.	<i>Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat</i>	
5.2.2.24.02.	<i>Belanja Barang Yang Dijual Kepada Pihak Ketiga</i>	
5.2.2.25.	<b>Belanja Kontribusi</b>	
5.2.2.25.01.	<i>Belanja Iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia</i>	
5.2.2.25.02.	<i>Belanja Iuran Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia</i>	
5.2.2.26.	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	
5.2.2.26.01.	<i>Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD</i>	
5.2.2.27.	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS</b>	
5.2.2.27.01.	<i>Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan</i>	
5.2.2.27.02.	<i>Belanja sosialisasi ( workshop, simposium, lokakarya, seminar )</i>	
5.2.2.27.03.	<i>Belanja bimbingan teknis</i>	
5.2.2.28.	<b>Pemberian Hadiah Uang Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga</b>	
5.2.2.28.01.	<i>Pemberian Hadiah Uang Kepada Masyarakat..</i>	
5.2.2.28.02.	<i>Pemberian Hadiah Uang Kepada Pihak Ketiga</i>	
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
5.2.3.01.	<b>Belanja Modal Pengadaan Tanah</b>	
5.2.3.01.01.	<i>Belanja modal Pengadaan Tanah untuk kantor</i>	
5.2.3.01.02.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Sarana Kesehatan</i>	
5.2.3.01.03.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Sarana Pendidikan</i>	
5.2.3.01.04.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Sarana Perhubungan</i>	
5.2.3.01.05.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Sarana Perdagangan</i>	
5.2.3.01.06.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Sarana Olahraga/hiburan</i>	
5.2.3.01.07.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Sarana Hiburan</i>	
5.2.3.01.08.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Sarana Ibadah</i>	
5.2.3.01.09.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Perumahan/Perkampungan</i>	
5.2.3.01.10.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.01.11.	<i>Belanja modal Pengadaan tanah untuk Gudang</i>	
5.2.3.01.12.	<i>Belanja modal pengadaan tanah jalan dan sungai</i>	
5.2.3.01.13.	<i>Belanja modal sertifikasi tanah</i>	
5.2.3.01.14.	<i>Dst.</i>	
5.2.3.02.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat</b>	
5.2.3.02.01.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Tractor</i>	
5.2.3.02.02.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Grader</i>	
5.2.3.02.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Excavator</i>	
5.2.3.02.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Pile Driver</i>	
5.2.3.02.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Hauler</i>	
5.2.3.02.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Asphalt Equipment</i>	
5.2.3.02.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Compacting Equipment</i>	
5.2.3.02.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Aggragate &amp; Concrete Equipment</i>	
5.2.3.02.09.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Loader</i>	
5.2.3.02.10.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Alat Pengangkat</i>	
5.2.3.02.11.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Mesin Proses</i>	
5.2.3.02.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Dredger</i>	
5.2.3.02.13.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Floating Excavator</i>	
5.2.3.02.14.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Amphibi Dregder</i>	
5.2.3.02.15.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Kapal Tarik</i>	
5.2.3.02.16.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Mesin Proses Apung</i>	
5.2.3.02.17.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Alat Penarik</i>	
5.2.3.02.18.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Feeder</i>	
5.2.3.02.19.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Compressor</i>	
5.2.3.02.20.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Electric Generating Set</i>	
5.2.3.02.21.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Pompa</i>	
5.2.3.02.22.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Mesin Bor</i>	
5.2.3.02.23.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Unit Pemeliharaan Lapangan</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.02.24.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Alat Pengolahan Air Kotor</i>	
5.2.3.02.25.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Pembangkit Uap Air Panas/ Sistem Generator</i>	
5.2.3.02.26.	<i>dst.</i>	
5.2.3.03.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>	
5.2.3.03.01.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Sedan</i>	
5.2.3.03.02.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Jeep</i>	
5.2.3.03.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Station Wagon</i>	
5.2.3.03.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Lain-lain</i>	
5.2.3.03.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Bus</i>	
5.2.3.03.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Bicro Bus</i>	
5.2.3.03.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Mini Bus</i>	
5.2.3.03.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Truck</i>	
5.2.3.03.09.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Pick Up</i>	
5.2.3.03.10.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Box</i>	
5.2.3.03.11.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Traller</i>	
5.2.3.03.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Semi Traler</i>	
5.2.3.03.13.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulans</i>	
5.2.3.03.14.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Jenazah</i>	
5.2.3.03.15.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Penerangan</i>	
5.2.3.03.16.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran</i>	
5.2.3.03.17.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Tangki</i>	
5.2.3.03.18.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Monitoring Frekwensi</i>	
5.2.3.03.19.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Perpustakaan Keliling</i>	
5.2.3.03.20.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Visual Mini (muwianai ) darat</i>	
5.2.3.03.21.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Satelit Link Van</i>	
5.2.3.03.22.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Panggung</i>	
5.2.3.03.23.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Pameran</i>	
5.2.3.03.24.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Out Side Broad Cast Van Radio</i>	
5.2.3.03.25.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Out side Broad cast Van televisi</i>	
5.2.3.03.26.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Produksi Film</i>	
5.2.3.03.27.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Kesehatan Masyarakat</i>	
5.2.3.03.28.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Kesehatan Hewan</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.03.29.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mobil Unit Pengangkut Uang</i>	
5.2.3.03.30.	<i>Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Roda 2</i>	
5.2.3.03.31.	<i>Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Roda 3</i>	
5.2.3.03.32.	<i>Dst.</i>	
5.2.3.04.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor</b>	
5.2.3.04.01.	<i>Belanja modal Pengadaan gerobak</i>	
5.2.3.04.02.	<i>Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong</i>	
5.2.3.04.03.	<i>Belanja modal Pengadaan Caravan</i>	
5.2.3.04.04.	<i>Belanja modal Pengadaan Sepeda</i>	
5.2.3.04.05.	<i>Belanja modal Pengadaan Becak</i>	
5.2.3.04.06.	<i>Belanja modal Pengadaan Tanduk Dorong</i>	
5.2.3.04.07.	<i>Dst</i>	
5.2.3.05.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor</b>	
5.2.3.05.01.	<i>Belanja modal Pengadaan kapal motor</i>	
5.2.3.05.02.	<i>Belanja modal Pengadaan kapal feri</i>	
5.2.3.05.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Minyak</i>	
5.2.3.05.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tongkang Bermotor</i>	
5.2.3.05.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tug Boat+Attachment</i>	
5.2.3.05.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Landing Ship Transportation (LST)</i>	
5.2.3.05.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Hidrofoli</i>	
5.2.3.05.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor</i>	
5.2.3.05.09.	<i>Belanja Modal Pengadaan Speed Boat</i>	
5.2.3.05.10.	<i>Belanja Modal Pengadaan Motor Boat</i>	
5.2.3.05.11.	<i>Belanja Modal Pengadaan Klotok</i>	
5.2.3.05.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Ferry</i>	
5.2.3.05.13.	<i>Belanja Modal Pengadaan Hidrofoil</i>	
5.2.3.05.14.	<i>Belanja Modal Pengadaan Jetfol</i>	
5.2.3.05.15.	<i>Belanja Modal Pengadaan Long Boat</i>	
5.2.3.05.16.	<i>Belanja Modal Pengadaan Surver Boat</i>	
5.2.3.05.17.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Anti Polusi</i>	
5.2.3.05.18.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Perambuan</i>	
5.2.3.05.19.	<i>Belanja Modal Pengadaan Out Boat Motor</i>	
5.2.3.05.20.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Hydrografi</i>	
5.2.3.05.21.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Unit Penerangan Air</i>	
5.2.3.05.22.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Visual Mini</i>	
5.2.3.05.23.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Penangkap Ikan</i>	
5.2.3.05.24.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Pengangkut Hewan</i>	
5.2.3.05.25.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kapal Patroli Pantai</i>	
5.2.3.05.26.	<i>Dst</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.06.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor</b>	
5.2.3.06.01.	<i>Belanja modal Pengadaan perahu layar</i>	
5.2.3.06.02.	<i>Belanja modal Pengadaan Perahu / Sampan</i>	
5.2.3.06.03.	<i>Belanja modal Pengadaan Tongkang</i>	
5.2.3.06.04.	<i>Belanja modal Pengadaan Perahu Karet</i>	
5.2.3.06.05.	<i>Belanja modal Pengadaan Ponton</i>	
5.2.3.06.06.	<i>Dst</i>	
5.2.3.07.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara</b>	
5.2.3.07.01.	<i>Belanja modal Pengadaan pesawat kargo</i>	
5.2.3.07.02.	<i>Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang</i>	
5.2.3.07.03.	<i>Belanja modal Pengadaan Mesin Jet (Fuel Jet)</i>	
5.2.3.07.04.	<i>Belanja modal Pengadaan Turbo Prop</i>	
5.2.3.07.05.	<i>Kapal Terbang Baling-baling</i>	
5.2.3.07.06.	<i>Belanja modal Pengadaan Helicopter</i>	
5.2.3.07.07.	<i>Belanja modal Pengadaan Ampibi</i>	
5.2.3.07.08.	<i>Dst</i>	
5.2.3.08.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel</b>	
5.2.3.08.01.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut</i>	
5.2.3.08.02.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pres</i>	
5.2.3.08.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketam</i>	
5.2.3.08.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pres hidrolis &amp; Punsh</i>	
5.2.3.08.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor Cylinder</i>	
5.2.3.08.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Skrup</i>	
5.2.3.08.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Milling</i>	
5.2.3.08.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Purel</i>	
5.2.3.08.09.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Perapen</i>	
5.2.3.08.10.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Sikat Kulit</i>	
5.2.3.08.11.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemootong Kulit</i>	
5.2.3.08.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit Kulit</i>	
5.2.3.08.13.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengepres Kulit</i>	
5.2.3.08.14.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor</i>	
5.2.3.08.15.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Las</i>	
5.2.3.08.16.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Dynamo Kron</i>	
5.2.3.08.17.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Sikat Besi Kron</i>	
5.2.3.08.18.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemootong Fybre Glass/Polyster</i>	
5.2.3.08.19.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Gulung Listrik</i>	
5.2.3.08.20.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pelubang</i>	
5.2.3.08.21.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Penekuk Plat</i>	
5.2.3.08.22.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Gunting Plat</i>	
5.2.3.08.23.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembnegkok Uni</i>	
5.2.3.08.24.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Amplas Plat</i>	
5.2.3.08.25.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemootong Plat</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.08.26.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Transmision Outomilive</i>	
5.2.3.08.27.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Gerinda Tangan</i>	
5.2.3.08.28.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor Tangan</i>	
5.2.3.08.29.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Cylinder</i>	
5.2.3.08.30.	<i>Belanja Modal Pengadaan Refitting Machine</i>	
5.2.3.08.31.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Gulung Manual</i>	
5.2.3.08.32.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Ampelas Tangan</i>	
5.2.3.08.33.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Ampelas Rol Kecil</i>	
5.2.3.08.34.	<i>Belanja Modal Pengadaan Winder</i>	
5.2.3.08.35.	<i>Belanja Modal Pengadaan Transformator</i>	
5.2.3.08.36.	<i>Belanja Modal Pengadaan Auto Lift</i>	
5.2.3.08.37.	<i>Belanja Modal Pengadaan Car Washer</i>	
5.2.3.08.38.	<i>Belanja Modal Pengadaan Steam Cleaner</i>	
5.2.3.08.39.	<i>Belanja Modal Pengadaan Lubricating Equipment</i>	
5.2.3.08.40.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Sporing</i>	
5.2.3.08.41.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mbrake Drum Lathe/ Mesin Perata Tromol</i>	
5.2.3.08.42.	<i>Belanja Modal Pengadaan Pengasah Lobang Stang Piston</i>	
5.2.3.08.43.	<i>Belanja Modal Pengadaan Overhead Grane</i>	
5.2.3.08.44.	<i>Belanja Modal Pengadaan Auto Hoist</i>	
5.2.3.08.45.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji</i>	
5.2.3.08.46.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketam</i>	
5.2.3.08.47.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor</i>	
5.2.3.08.48.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghalus</i>	
5.2.3.08.49.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyambung Papan</i>	
5.2.3.08.50.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit Terpal</i>	
5.2.3.08.51.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Celup</i>	
5.2.3.08.52.	<i>Belanja Modal Pengadaan Evaporator</i>	
5.2.3.08.53.	<i>Belanja Modal Pengadaan Air Blower</i>	
5.2.3.08.54.	<i>Belanja Modal Pengadaan Brine Tank</i>	
5.2.3.08.55.	<i>Belanja Modal Pengadaan Filling Device</i>	
5.2.3.08.56.	<i>Belanja Modal Pengadaan Pipping Time Device</i>	
5.2.3.08.57.	<i>Belanja Modal Pengadaan Thawing Tank</i>	
5.2.3.08.58.	<i>Belanja Modal Pengadaan Can Frame</i>	
5.2.3.08.59.	<i>Belanja Modal Pengadaan Bring Tank Cover</i>	
5.2.3.08.60.	<i>Belanja Modal Pengadaan Clear Ice Equipment</i>	
5.2.3.08.61.	<i>Belanja Modal Pengadaan Reciver</i>	
5.2.3.08.62.	<i>Belanja Modal Pengadaan Elektrik Panel Cintrol</i>	
5.2.3.08.63.	<i>Belanja Modal Pengadaan Trafo Stater</i>	
5.2.3.08.64.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tabung NH3</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.08.65.	<i>Belanja Modal Pengadaan Pompa Oliez Compressor</i>	
5.2.3.08.66.	<i>Belanja Modal Pengadaan Condensor</i>	
5.2.3.08.67.	<i>Belanja Modal Pengadaan Agitator</i>	
5.2.3.08.68.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kontruksi Logam</i>	
5.2.3.08.69.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perkakas Dapur Tempa</i>	
5.2.3.08.70.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bangku Kerja</i>	
5.2.3.08.71.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengecoran Logam</i>	
5.2.3.08.72.	<i>Belanja Modal Pengadaan Rol</i>	
5.2.3.08.73.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pemotong Plat</i>	
5.2.3.08.74.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perkakas Press Hidrolik</i>	
5.2.3.08.75.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pemotong Kabel Sling</i>	
5.2.3.08.76.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perkakas Pengecatan Kendaraan</i>	
5.2.3.08.77.	<i>Belanja Modal Pengadaan Pelengki</i>	
5.2.3.08.78.	<i>Belanja Modal Pengadaan ATBM</i>	
5.2.3.08.79.	<i>Belanja Modal Pengadaan Armature Drying Oven</i>	
5.2.3.08.80.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mica Undercutter</i>	
5.2.3.08.81.	<i>Belanja Modal Pengadaan Comutator Turning Tool</i>	
5.2.3.08.82.	<i>Belanja Modal Pengadaan Lubricating Set</i>	
5.2.3.08.83.	<i>Belanja Modal Pengadaan Jembatan Service</i>	
5.2.3.08.84.	<i>Belanja Modal Pengadaan Dongkrak</i>	
5.2.3.08.85.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tekel</i>	
5.2.3.08.86.	<i>Belanja Modal Pengadaan Gantry</i>	
5.2.3.08.87.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tripot</i>	
5.2.3.08.88.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tool Kit Set</i>	
5.2.3.08.89.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tool Kit Boks</i>	
5.2.3.08.90.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tool Cabinet Set</i>	
5.2.3.08.91.	<i>Belanja Modal Pengadaan Fuller Set</i>	
5.2.3.08.92.	<i>Belanja Modal Pengadaan TapDies</i>	
5.2.3.08.93.	<i>Belanja Modal Pengadaan Groeper</i>	
5.2.3.08.94.	<i>Belanja Modal Pengadaan Engine Stand</i>	
5.2.3.08.95.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kunci Momet</i>	
5.2.3.08.96.	<i>Dst</i>	
5.2.3.09.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan</b>	
5.2.3.09.01.	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pembudidayaan Pertanian</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.09.02.	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pembudidayaan Perkebunan</i>	
5.2.3.09.03.	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pembudidayaan Perikanan</i>	
5.2.3.09.04.	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Pembudidayaan Perternakan</i>	
5.2.3.09.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Pengolah Produk Hasil Pertanian</i>	
5.2.3.09.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Pengolah Produk Hasil Perkebunan</i>	
5.2.3.09.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Pengolah Produk Hasil Perikanan</i>	
5.2.3.09.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Pengolah Produk Hasil Peternakan</i>	
5.2.3.09.09.	<i>Dst</i>	
5.2.3.10.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>	
5.2.3.10.01.	<i>Belanja modal Pengadaan mesin tik</i>	
5.2.3.10.02.	<i>Belanja modal Pengadaan mesin hitung</i>	
5.2.3.10.03.	<i>Belanja modal Pengadaan mesin stensil</i>	
5.2.3.10.04.	<i>Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy</i>	
5.2.3.10.05.	<i>Belanja modal Pengadaan mesin cetak</i>	
5.2.3.10.06.	<i>Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas</i>	
5.2.3.10.07.	<i>Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas</i>	
5.2.3.10.08.	<i>Belanja modal Pengadaan mesin penghancur Logam</i>	
5.2.3.10.09.	<i>Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik</i>	
5.2.3.10.10.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengoreksi Lembar Kerja</i>	
5.2.3.10.11.	<i>Belanja Modal Pengadaan Perforator</i>	
5.2.3.10.12.	<i>Belanja Modal Alat Detektor Uang Palsu</i>	
5.2.3.10.13.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi</i>	
5.2.3.10.14.	<i>Dst</i>	
5.2.3.11.	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	
5.2.3.11.01.	<i>Belanja modal Pengadaan meja gambar</i>	
5.2.3.11.02.	<i>Belanja modal Pengadaan almari</i>	
5.2.3.11.03.	<i>Belanja modal Pengadaan brankas</i>	
5.2.3.11.04.	<i>Belanja modal Pengadaan filling kabinet</i>	
5.2.3.11.05.	<i>Belanja modal Pengadaan white board/papan</i>	
5.2.3.11.06.	<i>Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu</i>	
5.2.3.11.07.	<i>Belanja modal Pengadaan AC</i>	
5.2.3.11.08.	<i>Belanja modal Pengadaan TV</i>	
5.2.3.11.09.	<i>Belanja modal Pengadaan Tiang Bendera</i>	
5.2.3.11.10.	<i>Belanja Pengadaan Tangga</i>	
5.2.3.11.11.	<i>Belanja Pengadaan Cash Box</i>	
5.2.3.11.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tenda</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.11.13.	<i>Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik</i>	
5.2.3.11.14.	<i>Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran</i>	
5.2.3.11.15.	<i>Belanja modal Pengadaan Papan Nama</i>	
5.2.3.11.16.	<i>Dst</i>	
5.2.3.12.	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>	
5.2.3.12.01.	<i>Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/ server</i>	
5.2.3.12.02.	<i>Belanja modal Pengadaan komputer/PC</i>	
5.2.3.12.03.	<i>Belanja modal Pengadaan komputer note book</i>	
5.2.3.12.04.	<i>Belanja modal Pengadaan printer</i>	
5.2.3.12.05.	<i>Belanja modal Pengadaan scanner</i>	
5.2.3.12.06.	<i>Belanja modal Pengadaan monitor/ display</i>	
5.2.3.12.07.	<i>Belanja modal Pengadaan CPU</i>	
5.2.3.12.08.	<i>Belanja modal Pengadaan UPS/ stabilizer</i>	
5.2.3.12.09.	<i>Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer</i>	
5.2.3.12.10.	<i>Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer</i>	
5.2.3.12.11.	<i>Belanja modal pengadaan software/ lisensi program</i>	
5.2.3.12.12.	<i>Belanja Modal Pengembangan Software</i>	
5.2.3.12.13.	<i>Dst</i>	
5.2.3.13.	<b>Belanja Modal Pengadaan mebeulair</b>	
5.2.3.13.01	<i>Belanja modal Pengadaan Meja/ Kursi Kerja</i>	
5.2.3.13.02	<i>Belanja modal Pengadaan Meja/ Kursi Tamu</i>	
5.2.3.13.03	<i>Belanja modal Pengadaan Meja/ Kursi Siswa</i>	
5.2.3.13.04	<i>Belanja modal Pengadaan Meja/ Kursi Rapat</i>	
5.2.3.13.05	<i>Belanja modal Pengadaan Meja Komputer</i>	
5.2.3.13.06	<i>Belanja modal Pengadaan Rak</i>	
5.2.3.13.07	<i>Belanja modal Pengadaan Almari</i>	
5.2.3.13.08	<i>Belanja modal Pengadaan Tempat Tidur</i>	
5.2.3.13.09	<i>Belanja modal Pengadaan Meubelair Khusus</i>	
5.2.3.13.10	<i>Dst</i>	
5.2.3.14.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur/ Rumah Tangga</b>	
5.2.3.14.01.	<i>Belanja modal Pengadaan tabung gas</i>	
5.2.3.14.02.	<i>Belanja modal Pengadaan kompor gas</i>	
5.2.3.14.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kompor Listrik</i>	
5.2.3.14.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kompor Minyak</i>	
5.2.3.14.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kompor Kompresor</i>	
5.2.3.14.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Penanak/ Penghangat Makanan</i>	
5.2.3.14.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Teko</i>	
5.2.3.14.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Penggiling Bumbu</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.14.09.	<i>Belanja Modal Pengadaan Oven</i>	
5.2.3.14.10.	<i>Belanja Modal Pengadaan Dispenser</i>	
5.2.3.14.11.	<i>Belanja Modal Pengadaan Kitchen set</i>	
5.2.3.14.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Parutan Kelapa</i>	
5.2.3.14.13.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci</i>	
5.2.3.14.14.	<i>Belanja Modal Pengadaan seterika</i>	
5.2.3.14.15.	<i>Belanja modal Pengadaan Kipas Angin</i>	
5.2.3.14.16.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan kebersihan</i>	
5.2.3.14.17.	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit</i>	
5.2.3.14.18.	<i>Belanja modal Pengadaan jam dinding/ meja</i>	
5.2.3.14.19.	<i>Belanja Modal Pengadaan Piring/ Gelas/ Mangkuk/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau</i>	
5.2.3.14.20.	<i>Dst</i>	
5.2.3.15.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga/Kantor</b>	
5.2.3.15.01.	<i>Belanja modal Pengadaan lampu hias</i>	
5.2.3.15.02.	<i>Belanja modal pengadaan gorden</i>	
5.2.3.15.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga</i>	
5.2.3.15.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Karpet/ Permadani</i>	
5.2.3.15.05.	<i>Belanja Modal Taplak Meja</i>	
5.2.3.15.06.	<i>Dst</i>	
5.2.3.16.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio</b>	
5.2.3.16.01.	<i>Belanja modal Pengadaan Alat Perekam</i>	
5.2.3.16.02.	<i>Belanja modal Pengadaan Peralatan Audio Visual</i>	
5.2.3.16.03.	<i>Dst</i>	
5.2.3.17.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi</b>	
5.2.3.17.01.	<i>Belanja modal Pengadaan telepon</i>	
5.2.3.17.02.	<i>Belanja modal Pengadaan faximili</i>	
5.2.3.17.03.	<i>Alat Komunikasi Radio SSB</i>	
5.2.3.17.04.	<i>Alat Komunikasi Radio HF/FM</i>	
5.2.3.17.05.	<i>Alat Komunikasi Radio VHF</i>	
5.2.3.17.06.	<i>Alat Komunikasi Radio UHF</i>	
5.2.3.17.07.	<i>Publik Address (Lapangan)</i>	
5.2.3.17.08.	<i>Wireless Amplifier</i>	
5.2.3.17.09.	<i>Slide Projector (Lapangan)</i>	
5.2.3.17.10.	<i>Morse Keyer</i>	
5.2.3.17.11.	<i>Automatic Morse Keyer</i>	
5.2.3.17.12.	<i>Alat Semboyan</i>	
5.2.3.17.13.	<i>Antena Pemancar/ Penerima</i>	
5.2.3.17.14.	<i>Dst</i>	
5.2.3.18.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur</b>	
5.2.3.18.01.	<i>Belanja modal Pengadaan timbangan</i>	
5.2.3.18.02.	<i>Belanja modal Pengadaan teodolite</i>	
5.2.3.18.03.	<i>Belanja modal Pengadaan alat uji emisi</i>	
5.2.3.18.04.	<i>Belanja modal Pengadaan alat GPS</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.18.05.	<i>Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi</i>	
5.2.3.18.06.	<i>Belanja modal Pengadaan bejana ukur</i>	
5.2.3.18.07.	<i>Belanja modal Pengadaan barometer</i>	
5.2.3.18.08.	<i>Belanja modal Pengadaan seismograph</i>	
5.2.3.18.09.	<i>Belanja modal Pengadaan ultrasonograph</i>	
5.2.3.18.10.	<i>Belanja modal Pengadaan Waterpass</i>	
5.2.3.18.11.	<i>Belanja Modal Alat Ukur Jalan</i>	
5.2.3.18.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Teropong</i>	
5.2.3.18.13.	<i>Belanja Modal Alat Ukur Geometri</i>	
5.2.3.18.14.	<i>Dst</i>	
5.2.3.19.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran/Kesehatan</b>	
5.2.3.19.01.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum</i>	
5.2.3.19.02.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi</i>	
5.2.3.19.03.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT</i>	
5.2.3.19.04.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata</i>	
5.2.3.19.05.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah</i>	
5.2.3.19.06.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak</i>	
5.2.3.19.07.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan</i>	
5.2.3.19.08.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin</i>	
5.2.3.19.09.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi</i>	
5.2.3.19.10.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi</i>	
5.2.3.19.11.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi</i>	
5.2.3.19.12.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan</i>	
5.2.3.19.13.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi</i>	
5.2.3.19.14.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis</i>	
5.2.3.19.15.	<i>Belanja Modal pengadaan Sterelisateur</i>	
5.2.3.19.16.	<i>Belanja Modal Pengadaan alat - alat kedokteran radiologi</i>	
5.2.3.19.17.	<i>Belanja Modal Pengadaan alat - alat kedokteran rehabilitasi medik</i>	
5.2.3.19.18.	<i>Belanja Modal Pengadaan alat - alat kedokteran paru</i>	
5.2.3.19.19.	<i>Alat Kesehatan Perawatan</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.19.20.	<i>Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis</i>	
5.2.3.19.21.	<i>Alat Kesehatan Olahraga</i>	
5.2.3.19.22.	<i>Dst</i>	
5.2.3.20.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium</b>	
5.2.3.20.01..	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi</i>	
5.2.3.20.02.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi</i>	
5.2.3.20.03.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia</i>	
5.2.3.20.04.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian</i>	
5.2.3.20.05.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan</i>	
5.2.3.20.06.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan</i>	
5.2.3.20.07.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan</i>	
5.2.3.20.08.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa</i>	
5.2.3.20.09.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah</i>	
5.2.3.20.10.	<i>Belanja modal Pengadaan alat-alat labolatorium kesehatan</i>	
5.2.3.20.11.	<i>Dst</i>	
5.2.3.21.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan</b>	
5.2.3.21.01.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.</i>	
5.2.3.21.02.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over</i>	
5.2.3.21.03.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass</i>	
5.2.3.21.04.	<i>Belanja modal Pengadaan komponen jalan (trotoar, saluran, median)</i>	
5.2.3.21.05.	<i>Dst</i>	
5.2.3.22.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan</b>	
5.2.3.22.01.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung</i>	
5.2.3.22.02.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton</i>	
5.2.3.22.03.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang</i>	
5.2.3.22.04.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air</i>	
5.2.3.22.05.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan Box Culvert</i>	
5.2.3.22.06.	<i>Dst</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.23.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air</b>	
5.2.3.23.01.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan</i>	
5.2.3.23.02.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk</i>	
5.2.3.23.03.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan</i>	
5.2.3.23.04.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah</i>	
5.2.3.23.05.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi</i>	
5.2.3.23.06.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/ air minum</i>	
5.2.3.23.07.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir</i>	
5.2.3.23.08.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air</i>	
5.2.3.23.09.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuang/ drainase/ sanitasi/ bozem</i>	
5.2.3.23.10.	<i>Belanja modal Pengadaan Konstruksi Sumur Bor</i>	
5.2.3.23.11.	<i>Belanja modal Pengadaan Konstruksi Sumur Resapan</i>	
5.2.3.23.12.	<i>Dst</i>	
5.2.3.24.	<b>Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota</b>	
5.2.3.24.01	<i>Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan</i>	
5.2.3.24.02	<i>Belanja modal Pengadaan lampu hias taman</i>	
5.2.3.24.03	<i>Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)</i>	
5.2.3.24.04	<i>Dst</i>	
5.2.3.25.	<b>Belanja Modal Pengadaan Instalasi</b>	
5.2.3.25.01.	<i>Belanja modal Pengadaan instalasi listrik</i>	
5.2.3.25.02.	<i>Belanja modal Pengadaan instalasi telepon</i>	
5.2.3.25.03.	<i>Belanja modal Pengadaan instalasi Gas</i>	
5.2.3.25.04.	<i>Belanja modal Pengadaan instalasi Air</i>	
5.2.3.25.05.	<i>Dst</i>	
5.2.3.26.	<b>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan</b>	
5.2.3.26.01.	<i>Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor</i>	
5.2.3.26.02.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan</i>	
5.2.3.26.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Rumah Dinas</i>	
5.2.3.26.04.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Gudang</i>	
5.2.3.26.05.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Bangunan Bersejarah</i>	
5.2.3.26.06.	<i>Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen / Tugu Peringatan</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.26.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah</i>	
5.2.3.26.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Kesehatan</i>	
5.2.3.26.09.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian sarana perhubungan</i>	
5.2.3.26.10.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Perdagangan</i>	
5.2.3.26.11.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Pertanian</i>	
5.2.3.26.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Perkebunan</i>	
5.2.3.26.13.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Perikanan</i>	
5.2.3.26.14.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Peternakan</i>	
5.2.3.26.15.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian sarana olah raga / kesenian / kebudayaan</i>	
5.2.3.26.16.	<i>Belanja Modal Pengadaan Bangunan Sarana Pengolahan Sampah / Limbah</i>	
5.2.3.26.17.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian tempat ibadah</i>	
5.2.3.26.18.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian tempat wisata</i>	
5.2.3.26.19.	<i>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana Publikasi</i>	
5.2.3.26.20.	<i>Dst</i>	
5.2.3.27.	<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan</b>	
5.2.3.27.01.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Pengetahuan Umum (Kamus, Ensiklopedia, dll)</i>	
5.2.3.27.02.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Filsafat</i>	
5.2.3.27.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Agama</i>	
5.2.3.27.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Sosial</i>	
5.2.3.27.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Bahasa</i>	
5.2.3.27.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika dan Pengetahuan Alam</i>	
5.2.3.27.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis</i>	
5.2.3.27.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga</i>	
5.2.3.27.09.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah</i>	
5.2.3.27.10.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Terbitan berkala</i>	
5.2.3.27.11.	<i>Belanja Modal Pengadaan Buku Laporan</i>	
5.2.3.27.12.	<i>Belanja Modal Pengadaan Barang Kepustakaan</i>	
5.2.3.27.20.	<i>Dst</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.28.	<b>Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan</b>	
5.2.3.28.01.	<i>Belanja Modal Pengadaan Pahatan</i>	
5.2.3.28.02.	<i>Belanja Modal Pengadaan Lukisan</i>	
5.2.3.28.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian</i>	
5.2.3.28.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga</i>	
5.2.3.28.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanda Penghargaan</i>	
5.2.3.28.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen</i>	
5.2.3.28.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Benda-Benda Bersejarah</i>	
5.2.3.28.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Barang Kerajinan</i>	
5.2.3.28.09.	<i>Dst</i>	
5.2.3.29.	<b>Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman</b>	
5.2.3.29.01.	<i>Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak</i>	
5.2.3.29.02.	<i>Belanja Modal Pengadaan Hewan Unggas</i>	
5.2.3.29.03.	<i>Belanja Modal Pengadaan Hewan Melata</i>	
5.2.3.29.04.	<i>Belanja Modal Pengadaan Hewan Ikan</i>	
5.2.3.29.05.	<i>Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang</i>	
5.2.3.29.06.	<i>Belanja Modal Pengadaan Hewan Pengaman</i>	
5.2.3.29.07.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanaman Perkebunan</i>	
5.2.3.29.08.	<i>Belanja Modal Pengadaan Tanaman Holtikultura</i>	
5.2.3.29.09.	<i>Dst</i>	
5.2.3.30.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan</b>	
5.2.3.30.01.	<i>Belanja modal Pengadaan senjata api</i>	
5.2.3.30.02.	<i>Belanja modal Pengadaan radar</i>	
5.2.3.30.03.	<i>Belanja modal Pengadaan mobil water canon</i>	
5.2.3.30.04.	<i>Belanja modal Pengadaan borgol</i>	
5.2.3.30.05.	<i>Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet</i>	
5.2.3.30.06.	<i>Belanja modal Pengadaan perisai/tameng</i>	
5.2.3.30.07.	<i>Belanja modal Pengadaan detektor logam</i>	
5.2.3.30.08.	<i>Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru</i>	
5.2.3.30.09.	<i>Belanja modal Pengadaan pentungan</i>	
5.2.3.30.10.	<i>Belanja modal Pengadaan helm</i>	
5.2.3.30.11.	<i>Belanja modal Pengadaan alarm/sirene</i>	
5.2.3.30.12.	<i>Belanja modal Pengadaan sentolop/senter</i>	
5.2.3.30.13.	<i>Belanja modal Pengadaan kawat berduri</i>	
5.2.3.30.14.	<i>Dst</i>	
5.2.3.31.	<b>Belanja Modal Dana BOS</b>	
5.2.3.31.01.	<i>Belanja Modal Dana BOS.</i>	
5.2.3.32.	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga</b>	
5.2.3.32.01.	<i>Belanja Modal Alat Olahraga Senam</i>	
5.2.3.32.02.	<i>Belanja Modal Alat Olahraga Air</i>	
5.2.3.32.03.	<i>Belanja Modal Alat Olahraga Udara</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
5.2.3.32.04.	<i>Belanja Modal Alat Olahraga Darat</i>	
5.2.3.32.05.	<i>Dst</i>	
5.2.3.33.	<b>Belanja Modal Alat Pengolah Sampah / Limbah</b>	
5.2.3.33.01.	<i>Belanja Modal pengadaan Tong / Keranjang Sampah</i>	
5.2.3.33.02.	<i>Belanja Modal Mesin Daur Ulang Sampah</i>	
5.2.3.33.03.	<i>Dst</i>	
5.2.3.34.	<b>Belanja Modal BLUD</b>	
5.2.3.34.01	<i>Belanja Belanja Modal BLUD RSUD</i>	
5.2.3.35.	<b>Belanja Modal Pemeliharaan Diatas Nilai Kapitalisasi</b>	
5.2.3.35.01.	<i>Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Diatas Nilai Kapitalisasi</i>	
5.2.3.35.02.	<i>Belanja Modal Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Diatas Nilai Kapitalisasi</i>	
5.2.3.35.03.	<i>Belanja Modal Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Diatas Nilai Kapitalisasi</i>	
5.2.3.35.04.	<i>Dst</i>	

#### E. KODE REKENING PEMBIAYAAN DAERAH

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya(SiLPA)</b>	
6.1.1.01.	<b>Pelampauan Penerimaan PAD</b>	
6.1.1.01.01.	<i>Pajak Daerah</i>	
6.1.1.01.02.	<i>Retribusi Daerah</i>	
6.1.1.01.03.	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	
6.1.1.01.04.	<i>Lain-Lain PAD yang Sah</i>	
6.1.1.02.	<b>Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan</b>	
6.1.1.02.01.	<i>Bagi Hasil Pajak</i>	
6.1.1.02.02.	<i>Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam</i>	
6.1.1.02.03.	<i>Dst ...</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
6.1.1.03.	<b>Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	
6.1.1.03.01.	<i>Pendapatan Hibah</i>	
6.1.1.03.02.	<i>Pendapatan Dana Darurat</i>	
6.1.1.03.03.	<i>Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya</i>	
6.1.1.03.04.	<i>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</i>	
6.1.1.03.05.	<i>Bantuan Keuangan dari Propinsi</i>	
6.1.1.04.	<b>Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya</b>	
6.1.1.04.01.	<i>Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung</i>	
6.1.1.04.02.	<i>Belanja Pegawai dari Belanja Langsung</i>	
6.1.1.04.03.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
6.1.1.04.04.	<i>Belanja Modal</i>	
6.1.1.04.05.	<i>Belanja Bunga</i>	
6.1.1.04.06.	<i>Belanja Subsidi</i>	
6.1.1.04.07.	<i>Belanja Hibah</i>	
6.1.1.04.08.	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	
6.1.1.04.09.	<i>Belanja Belanja Bagi Hasil</i>	
6.1.1.04.10.	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>	
6.1.1.04.11.	<i>Belanja Belanja Tidak Terduga</i>	
6.1.1.05.	<b>Kewajiban kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan</b>	
6.1.1.05.01.	<i>Uang Jaminan .....</i>	
6.1.1.05.02.	<i>Potongan Taspen</i>	
6.1.1.05.03.	<i>Potongan Beras</i>	
6.1.1.05.04.	<i>Askes</i>	
6.1.1.05.05.	<i>Dst.....</i>	
6.1.1.06.	<b>Kegiatan Lanjutan</b>	
6.1.1.06.01.	<i>Kegiatan .....</i>	
6.1.1.06.02.	<i>Kegiatan .....</i>	
6.1.1.06.03.	<i>Dst</i>	
6.1.1.07.	<b>Pembiayaan Netto</b>	
6.1.1.07.01.	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	
6.1.1.07.02.	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	
6.1.2.	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	
6.1.2.01.	<i>Pencairan Dana Cadangan</i>	
6.1.2.01.01.	<i>Pencairan Dana Cadangan Nomor .....</i>	
6.1.2.01.02.	<i>Dst.....</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
<b>6.1.3.</b>	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	
6.1.3.01.	<b>Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	
6.1.3.01.01.	<i>BUMD.....</i>	
6.1.3.02.	<b>Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga</b>	
6.1.3.02.01.	<i>.....</i>	
<b>6.1.4.</b>	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah</b>	
6.1.4.01.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah</b>	
6.1.4.01.01.	<i>Penerusan Pinjaman.....</i>	
6.1.4.01.02.	<i>Dst.....</i>	
6.1.4.02.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain</b>	
6.1.4.02.01.	<i>Pemerintah Daerah .....</i>	
6.1.4.02.02.	<i>Dst.....</i>	
6.1.4.03.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank</b>	
6.1.4.03.01.	<i>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Bank ....</i>	
6.1.4.04.	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	
6.1.4.04.01.	<i>Lembaga Keuangan Bukan Bank .....</i>	
6.1.4.05.	<b>Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah</b>	
6.1.4.05.01.	<i>Obligasi Atas Nama..</i>	
6.1.4.05.02.	<i>Obligasi Nomor.....</i>	
<b>6.1.5.</b>	<b>Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman</b>	
6.1.5.01.	<b>Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman</b>	
6.1.5.01.01.	<i>Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman</i>	
6.1.5.01.02.	<i>Penerimaan Kembali Dana Bergulir</i>	
<b>6.1.6.</b>	<b>Penerimaan Piutang Daerah</b>	
6.1.6.01.	<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah</b>	
6.1.6.01.01.	<i>Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Pajak Daerah</i>	
6.1.6.01.02.	<i>Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Retribusi Daerah</i>	
6.1.6.01.03.	<i>Penerimaan Piutang Daerah dari Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	
6.1.6.02.	<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah</b>	
6.1.6.02.01.	<i>Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah</i>	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
6.1.6.03.	<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Daerah Lain</b>	
6.1.6.03.01.	Pemerintah Daerah .....	
6.1.6.04.	<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bank</b>	
6.1.6.04.01.	Bank .....	
6.1.6.05.	<b>Penerimaan Piutang Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	
6.1.6.05.01.	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.2.1.</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	
6.2.1.01.	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	
6.2.1.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.02.	Dst.....	
<b>6.2.2.</b>	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</b>	
6.2.2.01.	<b>Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)</b>	
6.2.2.01.01.	BUMN..	
6.2.2.02.	<b>Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>	
6.2.2.02.01.	Bank Jatim	
6.2.2.02.02.	PDAM	
6.2.2.02.03.	PD. BPR (Bank Gresik)	
6.2.2.02.04.	PT Gresik Migas	
6.2.2.03.	<b>Badan Usaha Milik Swasta</b>	
6.2.2.03.01.	Badan...	
6.2.2.04.	<b>Dana Bergulir</b>	
6.2.2.04.01.	Dana bergulir kepada kelompok masyarakat	
6.2.3.	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>	
6.2.3.01.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>	
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman ...	
6.2.3.02.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah Lain</b>	
6.2.3.02.01.	Pemerintah Daerah	
6.2.3.02.02.	Dst....	
6.2.3.03.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank</b>	
6.2.3.03.01.	Bank Jatim	
6.2.3.03.02.	Dst....	
6.2.3.04.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	
6.2.3.04.01.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	

KODE	URAIAN	PENJELASAN
1	2	3
6.2.3.04.02.	<i>Pihak Ketiga</i>	
6.2.3.05.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah</b>	
6.2.3.05.01.	<i>Penerusan Pinjaman...</i>	
6.2.3.05.02.	<i>Dst....</i>	
6.2.3.06.	<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum jatuh tempo kepada Pemerintah Daerah Lain</b>	
6.2.3.06.01.	<i>Pemerintah Daerah....</i>	
6.2.3.06.02.	<i>Dst....</i>	
6.2.3.07.	<b>Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank</b>	
6.2.3.07.01.	<i>Bank ....</i>	
6.2.3.07.02.	<i>Dst....</i>	
6.2.3.08.	<b>Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>	
6.2.3.08.01.	<i>Lembaga keuangan bukan bank...</i>	
6.2.3.08.02.	<i>Dst....</i>	
6.2.3.09.	<b>Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo</b>	
6.2.3.09.01.	<i>Obligasi atas nama .....</i>	
6.2.3.09.02.	<i>Obligasi nomor.....</i>	
6.2.3.09.03.	<i>Dst .....</i>	
6.2.3.10.	<b>Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo</b>	
6.2.3.10.01.	<i>Obligasi atas nama ....</i>	
6.2.3.10.02.	<i>Obligasi nomor....</i>	
6.2.3.10.03.	<i>Dst .....</i>	
6.2.3.11.	<b>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga</b>	
6.2.3.11.01.	<i>Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga</i>	
6.2.4.	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>	
6.2.4.01.	<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah</b>	
6.2.4.01.01.	<i>Pemerintah</i>	
6.2.4.02.	<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain</b>	
6.2.4.02.01.	<i>Pemerintah Daerah ...</i>	
6.2.4.02.02.	<i>Dst ...</i>	
<b>6.3.</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	

**BAB III**  
**DAFTAR STANDART SATUAN HARGA HONORARIUM**  
**DAN JASA PERSONIL**

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
5.1.1.05.	<b>Insentif Pemungutan Pajak Daerah</b>	Tahun		Maksimal 5 % dari Target Pajak Daerah
5.1.1.06.	<b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	Tahun		Maksimal 5% dari Target Retribusi Daerah
<b>5.1.4.</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>			
5.1.4.05.	<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>			
5.1.4.05.01.	<i>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi.</i>			
	<i>Hibah Pembangunan Masjid</i>	Unit/Tahun	20.000.000	
	<i>Hibah Pembangunan Mushalah</i>	Unit/Tahun	10.000.000	
	<i>Hibah Pembangunan Tempat Ibadah Lainnya</i>	Unit/Tahun	20.000.000	
	<i>Hibah Pembangunan PAUD/TK/TPQ/MADIN/ PONPES</i>	Unit/Tahun	20.000.000	
	<i>Hibah Pembangunan SD/MI Swasta</i>	Unit/Tahun	40.000.000	
	<i>Hibah Pembangunan SLTP/MTs. Swasta</i>	Unit/Tahun	50.000.000	
	<i>Hibah Pembangunan SLTA/SMK/MA Swasta</i>	Unit/Tahun	60.000.000	
5.1.4.07.	<b>Belanja Hibah Dana BOS Daerah</b>			
5.1.4.07.01.	<i>Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta</i>	Siswa/Tahun	120.000	
		Guru Non Sertifikasi/Tahun	2.040.000	
		Biaya UN/Siswa	--	
5.1.4.07.02.	<i>Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/MTs. Swasta</i>	Siswa/Tahun	339.000	
		Guru Non Sertifikasi/Tahun	2.040.000	
		Biaya UN/Siswa	--	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.1.4.07.03.	<i>Belanja Hibah Dana BOS ke SLTA/SMK/MA Swasta</i>	Siswa/Tahun	240.000	
		Guru Non Sertifikasi/Tahun	1.980.000	
	<i>Biaya UN</i>	Siswa/Tahun	50.000	
	<i>Biaya UJI Kompetensi SMK</i>	Siswa/Tahun	25.000	
5.1.4.07.04.	<i>Belanja Hibah Dana BOS ke PAUD/TK</i>	Biaya Ops/Tahun	2.000.000	
	<i>TPQ/MADIN</i>	Biaya Ops/Tahun	1.400.000	
	<i>Guru yang ber NIG (nomor Induk Guru)</i>	Guru/Intensif/Tahun	1.980.000	
<b>5.1.5.</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>			
5.1.5.03.	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat</b>			
	<i>Santunan Kematian</i>	Orang	1.500.000	
	<i>Biaya Kuliah Mahasiswa Miskin</i>	Orang/Tahun	15.000.000	
	Pembangunan Rumah Gakin	Rumah	15.000.000	
	<i>Santunan Janda Miskin dan Anak Yatim</i>	Orang/Tahun	200.000	
<b>5.1.7.</b>	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK</b>			
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa			
	<i>Tunjangan Kepala Desa</i>	Orang/Bulan	1.500.000	
	<i>Tunjangan Sekretaris Desa</i>	Orang/Bulan	1.300.000	
	<i>Tunjangan Perangkat Desa (Kasi/Kasun)</i>	Orang/Bulan	1.200.000	
	<i>Tunjangan BPD</i>	Orang/Bulan	150.000	
	<i>Tunjangan RT/RW</i>	Orang/Tahun	300.000	
	<i>Tunjangan Purna tugas Kades</i>	Orang	10.000.000	<i>Tidak berlaku bagi kades yang terpilih kembali</i>
	<i>Kompensasi Purna tugas Sekdes non PNS (sesuai tahun pengabdian/per tahun Rp.1.000.000)</i>			
	<i>1 tahun</i>	Orang	1.000.000	
	<i>2 tahun</i>	Orang	2.000.000	
	<i>dst ...</i>			
	<i>19 tahun</i>	Orang	19.000.000	
	<i>&gt; 20 Tahun</i>	Orang	20.000.000	
	<i>Tunjangan Purna Tugas Perangkat Desa lainnya</i>	Orang	2.500.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
5.2.1.01.	<b>Honorarium PNS</b>			<i>Digunakan untuk memberikan honorarium kepada PNS dan CPNS</i>
5.2.1.01.01.	<i>Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan</i>			
	<i>A. Kegiatan Non Urusan Wajib/ Pilihan</i>			<i>Digunakan untuk kegiatan pada program dengan kode 01 s/d 14 kecuali pengadaan / Pemeliharaan gedung kantor</i>
	<i>1. Pagu Anggaran 20juta s/d 50juta</i>			
	<i>a. Pengarah</i>	OB	250.000	
	<i>b. Ketua</i>	OB	200.000	
	<i>c. Sekretaris</i>	OB	150.000	
	<i>d. Staf Pendukung</i>	OB	100.000	
	<i>2. Pagu Anggaran &gt; 50 juta</i>			
	<i>a. Pengarah</i>	OB	300.000	
	<i>b. Ketua</i>	OB	250.000	
	<i>c. Sekretaris</i>	OB	200.000	
	<i>d. Staf Pendukung</i>	OB	150.000	
	<i>B. Kegiatan Urusan Wajib/ Pilihan</i>			<i>Digunakan untuk keg pada program dengan kode 15 dst, serta pengadaan / Pemeliharaan gedung kantor</i>
	<b>1. Pagu Anggaran &lt;= 50juta</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>		--	
	<i>b. Pengarah II</i>		--	
	<i>c. Pengarah III</i>		--	
	<i>d. Ketua (PA/KPA)</i>	OB	250.000	
	<i>e. Sekretaris</i>	OB	200.000	
	<i>f. Staf Pendukung</i>	OB	150.000	
	<b>2. 50 jt &lt; Pagu Anggaran ≤ 100 jt</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	500.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	450.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	400.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	350.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	300.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	275.000	
	<i>g. Staf Pendukung</i>	OB	200.000	
	<b>3. 100 jt &lt; Pagu Anggaran ≤ 250 jt</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	550.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	500.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	450.000	
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	400.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	350.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	325.000	
	<i>g. Staf Pendukung</i>	OB	250.000	
	<b>4. 250 jt &lt; Pagu Anggaran ≤ 500 jt</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	600.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	550.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	500.000	
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	450.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	400.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	375.000	
	<i>g. Staf Pendukung</i>	OB	300.000	
	<b>5. 500 jt &lt; Pagu Anggaran ≤ 1 M</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	650.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	600.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	550.000	
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	500.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	400.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	375.000	
	<i>g. Staf Pendukung</i>	OB	300.000	
	<b>6. 1 M &lt; Pagu Anggaran ≤ 2,5 M</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	700.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	650.000	
	<i>c. Pengarah III</i>	OB	600.000	
	<i>d. Pengarah IV/Asisten/ Pengguna Anggaran</i>	OB	550.000	
	<i>e. Ketua</i>	OB	500.000	
	<i>f. Sekretaris</i>	OB	475.000	
	<i>g. Staf Pendukung</i>	OB	400.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	1	2
	<b>7. 2,5 M &lt; Pagu Anggaran ≤ 5 M</b>			
	a. Pengarah I	OB	750.000	
	b. Pengarah II	OB	700.000	
	c. Pengarah III	OB	650.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pegguna Anggaran	OB	600.000	
	e. Ketua	OB	550.000	
	f. Sekretaris	OB	525.000	
	g. Staf Pendukung	OB	450.000	
	<b>8. 5 M &lt; Pagu Anggaran ≤ 10 M</b>			
	a. Pengarah I	OB	850.000	
	b. Pengarah II	OB	800.000	
	c. Pengarah III	OB	750.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pegguna Anggaran	OB	700.000	
	e. Ketua	OB	650.000	
	f. Sekretaris	OB	625.000	
	g. Staf Pendukung	OB	500.000	
	<b>9. 10 M &lt; Pagu Anggaran ≤ 50 M</b>			
	a. Pengarah I	OB	1.000.000	
	b. Pengarah II	OB	950.000	
	c. Pengarah III	OB	900.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pegguna Anggaran	OB	850.000	
	e. Ketua	OB	800.000	
	f. Sekretaris	OB	775.000	
	g. Staf Pendukung	OB	550.000	
	<b>10.50 M &lt; Pagu Anggaran ≤ 100 M</b>			
	a. Pengarah I	OB	1.150.000	
	b. Pengarah II	OB	1.100.000	
	c. Pengarah III	OB	1.050.000	
	d. Pengarah IV/Asisten/ Pegguna Anggaran	OB	1.000.000	
	e. Ketua	OB	950.000	
	f. Sekretaris	OB	925.000	
	g. Staf Pendukung	OB	600.000	
5.2.1.01.02.	<b>Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa</b>			
	Pengadaan Barang/Jasa:			
	1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OP	300.000	SPK pakai OP
	2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	OB	300.000	Non SPK pakai OB

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	3. Panitia/Kelompok Kerja ULP (konstruksi)			
	a. 100 jt < Pagu Anggaran ≤ 250 jt	OP	550.000	
	b. 250 juta < Pagu Anggaran 500 juta	OP	700.000	
	c. 500 juta < Pagu Anggaran < 1 Milyar	OP	850.000	
	d. 1 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 2,5 Milyar	OP	1.050.000	
	e. 2,5 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 5 Milyar	OP	1.200.000	
	f. 5 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 10 Milyar	OP	1.350.000	
	g. 10 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 50 Milyar	OP	1.900.000	
	5. Panitia/Kelompok Kerja ULP (Non Konstruksi)			
	a. 100 juta < Pagu Anggaran ≤ 250 juta	OP	500.000	
	b. 250 juta < Pagu Anggaran ≤ 500 juta	OP	600.000	
	c. 500 juta < Pagu Anggaran ≤ 1 Milyar	OP	750.000	
	d. 1 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 2,5 Milyar	OP	900.000	
	e. 2,5 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 5 Milyar	OP	1.050.000	
	f. 5 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 10 Milyar	OP	1.150.000	
	g. 10 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 50 Milyar	OP	1.450.000	
	h. Pagu Anggaran > 50 Milyar	OP	1.600.000	
	6. Panitia/Kelompok Kerja ULP (Konstruksi)			
	a. 50 juta < Pagu Anggaran ≤ 100 juta	OP	365.000	
	b. 100 juta < Pagu Anggaran ≤ 250 juta	OP	400.000	
	c. 250 juta < Pagu Anggaran ≤ 500 juta	OP	500.000	
	d. 500 juta < Pagu Anggaran ≤ 1 Milyar	OP	600.000	
	e. 1 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 2,5 Milyar	OP	750.000	
	f. 2,5 Milyar < Pagu Anggaran ≤ 5 Milyar	OP	900.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	7. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	OP	300.000	<i>SPK pakai OP</i>
	8. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	OB	300.000	<i>Non SPK pakai OB</i>
	9. Panitia Penerima hasil pekerjaan			
	a. 200 juta < Pagu Anggaran ≤ 1 Milyar	OP	450.000	
	b. >1 milyar	OP	600.000	
5.2.1.01.03.	Honorarium Peserta Rapat PNS			<i>Tidak boleh dobel dengan SPPD</i>
	Uang peserta rapat dalam daerah	OK	110.000	
	Uang peserta rapat luar daerah	OK	220.000	
	Uang Peserta Rapat Tim Anggaran/ Tim Legislasi	OK	250.000	
5.2.1.01.04.	<b>Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber PNS</b>			
	<b>1. Narasumber dari kementarian</b>			
	a. Narasumber setingkat Menteri	OJ	3.000.000	
	b. Narasumber setingkat eselon I	OJ	2.000.000	
	c. Narasumber setingkat eselon II	OJ	1.500.000	
	d. Narasumber setingkat eselon III	OJ	1.250.000	
	e. Narasumber setingkat eselon IV	OJ	1.000.000	
	f. Narasumber setingkat staf	OJ	750.000	
	<b>2. Narasumber dari Propinsi/ Kanwil</b>			
	a. Narasumber setingkat Gubernur Wagub	OJ	2.000.000	
	b. Narasumber setingkat eselon I	OJ	1.500.000	
	c. Narasumber setingkat eselon II	OJ	1.000.000	
	d. Narasumber setingkat eselon III	OJ	800.000	
	e. Narasumber setingkat eselon IV	OJ	600.000	
	f. Narasumber setingkat staf	OJ	400.000	
	<b>3. Narasumber dari Lingkup Kabupaten Gresik</b>			
	a. Narasumber setingkat Bupati/Wabup	OJ	1.000.000	
	b. Narasumber setingkat eselon I	OJ	-	
	c. Narasumber setingkat eselon II	OJ	500.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	d. Narasumber setingkat eselon III	OJ	400.000	
	e. Narasumber setingkat eselon IV	OJ	300.000	
	f. Narasumber setingkat staf	OJ	200.000	
	<b>4. Tenaga Ahli</b>			
	a. Tim Penyusunan Jurnal			
	• Penanggung Jawab	Oter	450.000	
	• Redaktur	Oter	350.000	
	• Penyunting/Editor	Oter	275.000	
	• Desain Grafis & Fotografer	Oter	180.000	
	• Sekretriati	Oter	150.000	
	• Pembuat Artikel	Halaman	150.000	
	b. Tim Penunjang Penelitian/Perekayasaan			
	• Pembantu Peneliti	OJ	25.000	
	• Koordinator Peneliti	OB	420.000	
	• Sekretaris Peneliti	OB	300.000	
	• Pengolah Data	orang/penelitian	1.540.000	
	• Petugas Survey	orang/responden	8.000	
	• Pembantu Lapangan	OH	80.000	
	c. Petugas Pengamanan Persandian	OB	500.000	
	d. Pembaca doa	OK	110.000	
	e. Pembawa acara	OK	110.000	
	f. Penceramah	OK	300.000	
	g. Moderator	Or/Sesi	150.000	
	h. Dirigent/korsik	OK	110.000	
	i. Pengawas ujian	OK	110.000	
	j. Petugas Pengamanan TNI/Polri	OB	2.000.000	
	k. Petugas Pengamanan TNI/Polri	OK	100.000	
	l. Petugas Patwal Dishub, dan Pol PP	OK	100.000	
5.2.1.01.05.	<b>Honorarium Tim Anggaran</b>			
	1. Ketua	OB	2.000.000	
	2. Wakil Ketua	OB	1.500.000	
	3. Sekretaris	OB	1.000.000	
	4. Anggota	OB	750.000	
5.2.1.01.06.	<b>Honorarium Tim Legislasi</b>			
	1. Ketua	OB	1.000.000	
	2. Wakil Ketua	OB	750.000	
	3. Sekretaris	OB	500.000	
	4. Anggota	OB	250.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
5.2.1.01.07.	<b>Honorarium Tim Teknis Kegiatan</b>			
	1. Ketua	OB	--	Maksimal = Honorarium pelaksanaan kegiatan (pokja, supervisi, dll)
	2. Wakil Ketua	OB	--	
	3. Sekretaris	OB	--	
	4. Anggota	OB	--	
5.2.1.01.08.	<b>Honorarium Pengelola Keuangan SKPD</b>			
	<b>1. Pagu Anggaran ≤ 1 Milyar</b>			
	a. PPK-SKPD	OB	400.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	350.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	300.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	200.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	300.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	175.000	
	<b>2. 1 Milyar &lt; Pagu Anggaran ≤ 2,5 Milyar</b>			
	a. PPK-SKPD	OB	450.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	400.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	350.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	250.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	350.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	225.000	
	<b>3. 2,5 Milyar &lt; Pagu Anggaran ≤ 5 Milyar</b>			
	a. PPK-SKPD	OB	550.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	450.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	400.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	300.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	400.000	
	f. Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	275.000	
	<b>4. 5 Milyar &lt; Pagu Anggaran ≤ 10 Milyar</b>			
	a. PPK-SKPD	OB	600.000	
	b. Bendahara Pengeluaran	OB	500.000	
	c. Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	450.000	
	d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran	OB	350.000	
	e. Bendahara Penerimaan	OB	450.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>f. Bendahara Penerimaan Pembantu</i>	OB	325.000	
	<b>5. 10 Milyar &lt; Pagu Anggaran &lt; 50 Milyar</b>			
	<i>a. PPK-SKPD</i>	OB	700.000	
	<i>b. Bendahara Pengeluaran</i>	OB	650.000	
	<i>c. Bendahara Pengeluaran Pembantu</i>	OB	500.000	
	<i>d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran</i>	OB	400.000	
	<i>e. Bendahara Penerimaan</i>	OB	600.000	
	<i>f. Bendahara Penerimaan Pembantu</i>	OB	375.000	
	<b>6. Pagu Anggaran &gt; 50 M</b>			
	<i>a. PPK-SKPD</i>	OB	800.000	
	<i>b. Bendahara Pengeluaran</i>	OB	750.000	
	<i>c. Bendahara Pengeluaran Pembantu</i>	OB	650.000	
	<i>d. Pembantu PPK-SKPD/ Bendahara Pengeluaran</i>	OB	450.000	
	<i>e. Bendahara Penerimaan</i>	OB	700.000	
	<i>f. Bendahara Penerimaan Pembantu</i>	OB	425.000	
5.2.1.01.09.	<b>Honorarium Pengelola Barang SKPD</b>			
	<i>1. Pengurus Barang UPTD/ Sekolah</i>	OB	200.000	
	<i>2. Pengurus Barang SKPD</i>			
	<i>a. Aset ≤ 2,5 Milyar</i>	OB	350.000	
	<i>b. 2,5 milyar &lt; Aset ≤ 5 M</i>	OB	375.000	
	<i>c. Aset &gt; 5 Milyar</i>	OB	400.000	
	<i>3. Pembantu Pengurus Barang SKPD</i>			
	<i>a. Aset ≤ 2,5 Milyar</i>	OB	250.000	
	<i>b. 2,5 milyar &lt; Aset ≤ 5 M</i>	OB	275.000	
	<i>c. Aset &gt; 5 Milyar</i>	OB	300.000	
5.2.1.01.10.	<b>Honorarium Tim Pelaksana Pengawasan Internal</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	1.250.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	1.000.000	
	<i>c. ketua</i>	OB	900.000	
	<i>d. Sekretaris</i>	OB	800.000	
	<i>e. Anggota</i>	OB	700.000	
	<i>f. Pendamping</i>	OB	600.000	
5.2.1.01.11.	<b>Honorarium Tim Penanganan Kasus Pengaduan</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	Orang/kasus	550.000	
	<i>c. ketua</i>	Orang/kasus	500.000	
	<i>d. Sekretaris</i>	Orang/kasus	450.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>e. Anggota</i>	Orang/kasus	400.000	
	<i>f. Pendamping</i>	Orang/kasus	350.000	
5.2.1.01.12.	<b>Honorarium Tim Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	Orang/kali	1.100.000	
	<i>c. ketua</i>	Orang/kali	1.000.000	
	<i>d. Sekretaris</i>	Orang/kali	900.000	
	<i>e. Anggota</i>	Orang/kali	800.000	
	<i>f. Pendamping</i>	Orang/kali	700.000	
5.2.1.01.13.	<b>Honorarium Tim Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	500.000	
	<i>c. ketua</i>	OB	450.000	
	<i>d. Sekretaris</i>	OB	400.000	
	<i>e. Anggota</i>	OB	350.000	
	<i>f. Pendamping</i>	OB	300.000	
5.2.1.01.14.	<b>Honorarium Tim Review Atas laporan keuangan daerah</b>			
	<i>a. Pengarah I</i>	OB	1.250.000	
	<i>b. Pengarah II</i>	OB	1.000.000	
	<i>c. ketua</i>	OB	900.000	
	<i>d. Sekretaris</i>	OB	800.000	
	<i>e. Anggota</i>	OB	700.000	
	<i>f. Pendamping</i>	OB	600.000	
	<b>Honorarium Analisis Review</b>			
	<i>a. Pengarah II</i>	Orang/kali	1.200.000	
	<i>b. Penanggungjawab</i>	Orang/kali	1.100.000	
	<i>c. ketua</i>	Orang/kali	1.000.000	
	<i>d. Sekretaris</i>	Orang/kali	900.000	
	<i>e. Anggota</i>	Orang/kali	800.000	
	<i>f. Pendamping</i>	Orang/kali	600.000	
<b>5.2.1.03.</b>	<b>Uang Lembur</b>			
5.2.1.03.01.	<b>Uang Lembur PNS</b>			
	<i>Uang lembur golongan I</i>	OJ	10.000	
	<i>Uang lembur golongan II</i>	OJ	13.000	
	<i>Uang lembur golongan III</i>	OJ	17.000	
	<i>Uang lembur golongan IV</i>	OJ	20.000	
	<i>Uang lembur Libur golongan I</i>	OJ	20.000	
	<i>Uang lembur libur golongan II</i>	OJ	26.000	
	<i>Uang lembur libur golongan III</i>	OJ	34.000	
	<i>Uang lembur libur golongan IV</i>	OJ	40.000	
	<i>Uang Makan Lembur</i>	OH	25.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>			
5.2.2.03.10.	<b>Belanja Jasa Kebersihan</b>			
	<i>Petugas Kebersihan Kantor</i>	OB	1.000.000	
	<i>Mandor/Pengawas Kebersihan</i>	OH	30.000	
	<i>Petugas Kebersihan Lingkungan/Jalan/Taman/drainase/ pemeliharaan PJU</i>	OH	25.000	
5.2.2.03.12.	<b>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan</b>			
	<i>Bidan/Perawat Non PNS</i>	OB	1.000.000	
	<i>Dokter Non PNS</i>	OB	1.500.000	
5.2.2.03.21.	<b>Belanja Jasa Administrasi Kantor (Non PNS)</b>			
	<i>Pembantu Administrasi Kantor</i>	OB	1.000.000	
5.2.2.03.22.	<b>Belanja Jasa Hiburan</b>			
	<i>Jasa Group Kesenian/Musik Lokal</i>	OK	2.500.000	
5.2.2.03.24.	<b>Belanja Jasa Sopir</b>			
	<i>Sopir Harian non PNS</i>	OH	100.000	
	<i>Sopir Bulanan non PNS</i>	OB	1.000.000	
5.2.2.03.25.	<b>Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Non PNS</b>			
	<b>1. Lainnya</b>			
	<i>a. Narasumber/Tenaga Pakar Ahli</i>	OJ	1.200.000	
	<i>b. Narasumber khusus/praktisi</i>	OJ	1.000.000	
	<i>c. Moderator Ahli</i>	Or/Sesi	600.000	
	<i>d. Moderator Lokal</i>	Or/Sesi	300.000	
	<i>e. Penceramah</i>	OK	300.000	
	<i>f. Rohaniwan</i>	OK	300.000	
	<i>g. Instruktur kursus/pelatihan</i>	OJ	100.000	
	<i>h. Penyuluh Non PNS</i>	OB	1.200.000	
	<b>2. Tenaga Ahli</b>			
	<i>a. Juri Kabupaten</i>	OK	250.000	
	<i>b. Juri Propinsi</i>	OK	300.000	
	<i>c. Juri Nasional</i>	OK	1.500.000	
	<i>d. Instruktur Senam</i>	OK	150.000	
	<i>e. Pembaca Do'a</i>	OK	100.000	
	<i>f. MC/Pembawa Acara</i>	OK	100.000	
	<i>g. Pengiring lagu</i>	OK	300.000	
	<i>h. Dirigent</i>	OK	100.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	i. Operator mesin/alat berat	OB	1.500.000	
	j. Ongkos Tanam	/batang	3.500	
	<b>3. Honor Penunjang Penelitian/Perekayasa</b>			
	a. Pembantu Peneliti	OJ	25.000	
	b. Koordinator Peneliti	OB	420.000	
	c. Sekretaris Peneliti	OB	300.000	
	d. Pengolah Data	Orang/ Penelitian	1.540.000	
	e. Petugas Survey	orang/responden	8.000	
	f. Pembantu Lapangan	OH	80.000	
5.2.2.03.26.	<b>Belanja Jasa Pemungutan Pajak Daerah</b>			
	Jasa penyampaian SPPT BB	OP	1.000	
	Jasa penagihan PBB	OP	1.500	
5.2.2.03.27.	<b>Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah</b>	--	--	
5.2.2.03.28.	<b>Belanja Jasa Lembur Pekerjaan Non PNS</b>	OJ	13.000	
5.2.2.03.29.	<b>Belanja Jasa Keamanan Non PNS</b>			
	Petugas Pengamanan Sipil	OB	1.200.000	
	Penjaga Kantor	OB	1.000.000	
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>			
5.2.2.06.02.	<b>Belanja Penggandaan</b>			
	Fotocopy A4/F4	lembar	200	
	Fotocopy A3	lembar	500	
	Fotocopy kalkir	lembar	10.000	
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>			
5.2.2.11.01.	<b>Belanja makanan dan minuman harian pegawai</b>			
5.2.2.11.02.	<b>Belanja makanan dan minuman rapat/ Kegiatan</b>			
	a. Nasi dos (kotak)	OK	25.000	
	b. Snack dalam dos	OK	10.000	
	c. Prasmanan	OK	50.000	
	d. Nasi bungkus	OK	15.000	
	e. Paket coffe break/ coffe morning	OK	15.000	
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
5.2.2.15.01.	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PNS)</b>			
	<b>Dari Kecamatan ke Desa/Kel atau sebaliknya (&gt;5 Km)</b>			
	a. Uang saku Sekda	OH	55.000	
	b. Uang saku Eselon II/b	OH	40.000	
	c. Uang saku Eselon III	OH	35.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	30.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	35.000	
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	30.000	
	<i>g. Uang saku staf gol. II/I</i>	OH	25.000	
	<i>h. Pengantar Surat/Kurir</i>	OK	25.000	
	<b>Dalam Kota di luar Kecamatan (&gt;5 Km)</b>			
	<i>a. Uang saku Sekda</i>	OH	100.000	
	<i>b. Uang saku Eselon II/b</i>	OH	90.000	
	<i>c. Uang saku Eselon III</i>	OH	75.000	
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	60.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	45.000	
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	40.000	
	<i>g. Uang saku staf gol. II/I</i>	OH	35.000	
	<i>h. Pengantar Surat/Kurir</i>	OK	25.000	
	<b>Dalam Kab. Gresik di luar P. Bawean (&gt;5 Km) dari batas kota</b>			
	<i>a. Uang saku Sekda</i>	OH	120.000	
	<i>b. Uang saku Eselon II/b</i>	OH	100.000	
	<i>c. Uang saku Eselon III</i>	OH	96.000	
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	90.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	96.000	
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	90.000	
	<i>g. Uang saku staf gol. II/I</i>	OH	90.000	
	<i>h. Uang representasi Sekda</i>	OH	130.000	
	<i>i. Uang representasi Es. II/b</i>	OH	100.000	
	<b>Dalam Kab. Gresik khusus P. Bawean</b>			
	<i>a. Uang saku Sekda</i>	OH	230.000	
	<i>b. Uang saku Eselon II/b</i>	OH	220.000	
	<i>c. Uang saku Eselon III</i>	OH	220.000	
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	200.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	200.000	
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	200.000	
	<i>g. Uang saku Staf gol. II/I</i>	OH	170.000	
	<i>h. Uang makan Sekda</i>	OH	130.000	
	<i>i. Uang makan Eselon II/b</i>	OH	110.000	
	<i>j. Uang makan Eselon III</i>	OH	110.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>k. Uang makan Eselon IV</i>	OH	100.000	
	<i>l. Uang makan staf Gol. IV</i>	OH	100.000	
	<i>m. Uang makan staf Gol. III</i>	OH	100.000	
	<i>n. Uang makan staf Gol. II/I</i>	OH	100.000	
	<i>o. Uang representasi Sekda</i>	OH	130.000	
	<i>p. Uang representasi Es. II/b</i>	OH	100.000	
5.2.2.15.02.	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (PNS)</b>			
	<b>Di luar Kabupaten dalam Prop. Jatim (s/d 50 Km)</b>	<i>(Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto dan Bangkalan)</i>		
	<i>a. Uang saku Sekda</i>	OH	120.000	
	<i>b. Uang saku Eselon II/b</i>	OH	100.000	
	<i>c. Uang saku Eselon III</i>	OH	96.000	
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	90.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	96.000	
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	90.000	
	<i>g. Uang saku Staf gol. II/I</i>	OH	90.000	
	<i>h. Uang representasi Sekda</i>	OH	130.000	
	<i>i. Uang representasi Es. II/b</i>	OH	100.000	
	<b>Luar Kabupaten dalam Prop. Jatim (&gt;50 s/d 100Km)</b>	<i>(Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Pamekasan, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang)</i>		
	<i>a. Uang saku Sekda</i>	OH	170.000	
	<i>b. Uang saku Eselon II/b</i>	OH	150.000	
	<i>c. Uang saku Eselon III</i>	OH	150.000	
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	120.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	120.000	
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	100.000	
	<i>g. Uang saku Staf gol. II/I</i>	OH	100.000	
	<i>h. Uang makan Sekda</i>	OH	130.000	
	<i>i. Uang makan Eselon II/b</i>	OH	110.000	
	<i>j. Uang makan Eselon III</i>	OH	110.000	
	<i>k. Uang makan Eselon IV</i>	OH	100.000	
	<i>l. Uang makan staf Gol. IV</i>	OH	100.000	
	<i>m. Uang makan staf Gol. III</i>	OH	100.000	
	<i>n. Uang makan staf Gol. II/I</i>	OH	100.000	
	<i>o. Uang representasi Sekda</i>	OH	100.000	
	<i>p. Uang representasi Es. II/b</i>	OH	100.000	
	<b>Luar Kabupaten dalam Prop. Jatim ≥100 s/d 200 Km</b>	<i>(Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan Magetan)</i>		
	<i>a. Uang saku Sekda</i>	OH	300.000	
	<i>b. Uang saku Eselon II/b</i>	OH	250.000	
	<i>c. Uang saku Eselon III</i>	OH	200.000	
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	145.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	145.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	140.000	
	<i>g. Uang saku Staf gol.II/I</i>	OH	135.000	
	<i>h. Uang makan Sekda</i>	OH	150.000	
	<i>i. Uang makan Eselon II/b</i>	OH	130.000	
	<i>j. Uang makan Eselon III</i>	OH	130.000	
	<i>k. Uang makan Eselon IV</i>	OH	100.000	
	<i>l. Uang makan staf Gol. IV</i>	OH	100.000	
	<i>m. Uang makan staf Gol. III</i>	OH	100.000	
	<i>n. Uang makan staf Gol. II/I</i>	OH	100.000	
	<i>o. Uang representasi Sekda</i>	OH	130.000	
	<i>p. Uang representasi Es. II/b</i>	OH	100.000	
	<b>Luar Kabupaten dalam Prop. Jatim &gt;200 s/d 300 Km</b>	<i>(Banyuwangi, Sumenep, Ponorogo, Pacitan, dan Ngawi)</i>		
	<i>a. Uang saku Sekda</i>	OH	300.000	
	<i>b. Uang saku Eselon II/b</i>	OH	270.000	
	<i>c. Uang saku Eselon III</i>	OH	260.000	
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	240.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	240.000	
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	240.000	
	<i>g. Uang saku Staf gol. II/I</i>	OH	230.000	
	<i>h. Uang makan Sekda</i>	OH	150.000	
	<i>i. Uang makan Eselon II/b</i>	OH	130.000	
	<i>j. Uang makan Eselon III</i>	OH	130.000	
	<i>k. Uang makan Eselon IV</i>	OH	120.000	
	<i>l. Uang makan staf Gol. IV</i>	OH	120.000	
	<i>m. Uang makan staf Gol. III</i>	OH	100.000	
	<i>n. Uang makan staf Gol. II/I</i>	OH	100.000	
	<i>o. Uang representasi Sekda</i>	OH	130.000	
	<i>p. Uang representasi Es. II/b</i>	OH	100.000	
	<b>Luar Jawa Timur</b>			
	<i>a. Uang saku Sekda</i>	OH	750.000	
	<i>b. Uang saku Eselon II/b</i>	OH	700.000	
	<i>c. Uang saku Eselon III</i>	OH	600.000	
	<i>d. Uang saku Eselon IV</i>	OH	500.000	
	<i>e. Uang saku Staf golongan IV</i>	OH	500.000	
	<i>f. Uang saku staf golongan III</i>	OH	400.000	
	<i>g. Uang saku Staf gol. II/I</i>	OH	350.000	
	<i>h. Uang makan Sekda</i>	OH	400.000	
	<i>i. Uang makan Eselon II/b</i>	OH	200.000	
	<i>j. Uang makan Eselon III</i>	OH	150.000	
	<i>k. Uang makan Eselon IV</i>	OH	140.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>l. Uang makan staf Gol. IV</i>	OH	140.000	
	<i>m. Uang makan staf Gol. III</i>	OH	125.000	
	<i>n. Uang makan staf Gol. II/I</i>	OH	125.000	
	<i>o. Uang representasi Sekda</i>	OH	130.000	
	<i>p. Uang representasi Es. II/b</i>	OH	100.000	
5.2.2.15.03.	<b>Belanja perjalanan dinas Ke Luar Negeri</b>			<i>disesuaikan dengan PMK tentang standar biaya masukan Tahun 2014</i>
5.2.2.15.04.	<b>Belanja Perjalanan Dinas Non PNS</b>			
	<b>Dari Kecamatan ke Desa/Kel atau sebaliknya &gt;5 km</b>			
	<i>a. Uang saku Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	75.000	
	<i>b. Uang saku Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	65.000	
	<i>c. Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	55.000	
	<i>d. Uang saku Staf</i>	OH	25.000	
	<i>e. Uang saku Masyarakat</i>	OH	25.000	
	<b>Dalam Kota di luar Kecamatan (&gt;5 Km)</b>			
	<i>a. Uang saku Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>b. Uang saku Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	125.000	
	<i>c. Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	100.000	
	<i>d. Uang saku Staf</i>	OH	35.000	
	<i>e. Uang saku Masyarakat</i>	OH	50.000	
	<b>Dalam Kab. Gresik di luar Bawean (&gt;5 Km) dari batas kota</b>			
	<i>a. Uang saku Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	180.000	
	<i>b. Uang saku Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>c. Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	120.000	
	<i>d. Uang saku Staf</i>	OH	90.000	
	<i>e. Uang saku Masyarakat</i>	OH	100.000	
	<i>f. Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	200.000	
	<i>g. Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD</i>	OH	175.000	
	<i>h. Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	130.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<b>Dalam Kab. Gresik khusus Bawean</b>			
	a. <i>Uang saku Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	180.000	
	b. <i>Uang saku Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	c. <i>Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	120.000	
	d. <i>Uang saku Staf</i>	OH	90.000	
	e. <i>Uang saku Masyarakat</i>	OH	100.000	
	f. <i>Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	200.000	
	g. <i>Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD</i>	OH	175.000	
	h. <i>Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	130.000	
	i. <i>Uang makan Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	j. <i>Uang Makan Wakil Bupati/Wakil DPRD</i>	OH	140.000	
	k. <i>Uang makan Anggota DPRD</i>	OH	130.000	
	l. <i>Uang makan Staf</i>	OH	100.000	
	m. <i>Uang makan masyarakat</i>	OH	100.000	
5.2.2.15.05.	<b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Non PNS)</b>			
	<b>Luar Kabupaten dalam Prop. Jatim (s/d 50 Km)</b>	<i>(Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, dan Bangkalan)</i>		
	a. <i>Uang saku Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	180.000	
	b. <i>Uang saku Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	c. <i>Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	120.000	
	d. <i>Uang saku Staf</i>	OH	90.000	
	e. <i>Uang saku Masyarakat</i>	OH	90.000	
	f. <i>Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	200.000	
	g. <i>Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD</i>	OH	175.000	
	h. <i>Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	130.000	
	<b>Luar Kabupaten dalam Prop. Jatim ≥50 s/d 100 Km</b>	<i>(Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Pamekasan, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang)</i>		
	a. <i>Uang saku Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	240.000	
	b. <i>Uang saku Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	240.000	
	c. <i>Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	170.000	
	d. <i>Uang saku Staf</i>	OH	100.000	
	e. <i>Uang saku Masyarakat</i>	OH	100.000	
	f. <i>Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	200.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>g. Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil DPRD</i>	OH	175.000	
	<i>h. Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	130.000	
	<i>i. Uang makan Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>j. Uang Makan Wakil Bupati/ Wakil DPRD</i>	OH	140.000	
	<i>k. Uang makan Anggota DPRD</i>	OH	130.000	
	<i>l. Uang makan Staf</i>	OH	100.000	
	<i>m. Uang makan masyarakat</i>	OH	100.000	
	<b>Luar Kabupaten dalam Prop. Jatim ≥100 s/d 200 Km</b>	<i>(Jember, Situbondo, Bondowoso, Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan Magetan)</i>		
	<i>a. Uang saku Bupati/ Ketua DPRD</i>	OH	400.000	
	<i>b. Uang saku Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD</i>	OH	350.000	
	<i>c. Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	300.000	
	<i>d. Uang saku Staf</i>	OH	135.000	
	<i>e. Uang saku Masyarakat</i>	OH	135.000	
	<i>f. Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD</i>	OH	200.000	
	<i>g. Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil DPRD</i>	OH	175.000	
	<i>h. Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	130.000	
	<i>i. Uang makan Bupati/ Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>j. Uang Makan Wakil Bupati/ Bupati/ Wakil DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>k. Uang makan Anggota DPRD</i>	OH	130.000	
	<i>l. Uang makan Staf</i>	OH	100.000	
	<i>m. Uang makan masyarakat</i>	OH	100.000	
	<b>Luar Kabupaten dalam Prop. Jatim ≥200 s/d 300 Km</b>	<i>(Banyuwangi, Sumenep, Ponorogo, Pacitan, dan Ngawi)</i>		
	<i>a. Uang saku Bupati/ Ketua DPRD</i>	OH	400.000	
	<i>b. Uang saku Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD</i>	OH	350.000	
	<i>c. Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	300.000	
	<i>d. Uang saku Staf</i>	OH	230.000	
	<i>e. Uang saku Masyarakat</i>	OH	230.000	
	<i>f. Uang Representasi Bupati/ Ketua DPRD</i>	OH	200.000	
	<i>g. Uang Representasi Wakil Bupati/ Wakil DPRD</i>	OH	175.000	
	<i>h. Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	130.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<i>i. Uang makan Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>j. Uang Makan Wakil Bupati/Wakil DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>k. Uang makan Anggota DPRD</i>	OH	150.000	
	<i>l. Uang makan Staf</i>	OH	100.000	
	<i>m. Uang makan masyarakat</i>	OH	100.000	
	<b>Luar Jawa Timur</b>			
	<i>a. Uang saku Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	950.000	
	<i>b. Uang saku Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD</i>	OH	850.000	
	<i>c. Uang saku Anggota DPRD</i>	OH	750.000	
	<i>d. Uang saku Staf</i>	OH	350.000	
	<i>e. Uang saku Masyarakat</i>	OH	350.000	
	<i>f. Uang Representasi Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	200.000	
	<i>g. Uang Representasi Wakil Bupati/Wakil DPRD</i>	OH	175.000	
	<i>h. Uang Representasi Anggota DPRD</i>	OH	130.000	
	<i>i. Uang makan Bupati/Ketua DPRD</i>	OH	200.000	
	<i>j. Uang Makan Wakil Bupati/Wakil DPRD</i>	OH	200.000	
	<i>k. Uang makan Anggota DPRD</i>	OH	200.000	
	<i>l. Uang makan Staf</i>	OH	125.000	
	<i>m. Uang makan masyarakat</i>	OH	125.000	
5.2.2.16.	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>			
5.2.2.16.01.	<i>Belanja beasiswa tugas belajar D3</i>	OB	500.000	
5.2.2.16.02.	<i>Belanja beasiswa tugas belajar S1</i>	OB	600.000	
5.2.2.16.03.	<i>Belanja beasiswa tugas belajar S2</i>	OB	700.000	
5.2.2.16.04.	<i>Belanja beasiswa tugas belajar S3</i>	OB	800.000	
<b>5.2.2.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pameran</b>			
5.2.2.17.01.	<b>Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan</b>			

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	a. Biaya pelatihan prajabatan gol I dan II	or/angk	3.470.000	
	b. Biaya Pelatihan prajabatan Gol III	org/angk	4.545.000	
	c. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat II	org/angk	30.261.000	
	d. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat III	org/angk	22.125.000	
	e. Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	org/angk	20.230.000	
5.2.2.17.02.	<b>Belanja sosialisasi (workshop, simposium, lokakarya, seminar)</b>			
5.2.2.17.03.	<b>Belanja Bimbingan Teknis/ Diklat</b>			
	<b>1. Wilayah Kabupaten Gresik</b>			
	a. 1 hari s/d 3 hari	OH	110.000	
	b. > 4 hari	OH	50.000	
	<b>2. Di luar Kab. Gresik dalam Wilayah Prop. Jatim</b>			
	<b>a. 1 hari s/d 7 hari</b>			
	Uang Saku Gol. IV	OH	120.000	
	Uang Saku Gol. III	OH	96.000	
	Uang Saku Gol. II/I	OH	90.000	
	<b>b. 8 hari s/d 14 hari</b>			
	Uang Saku Gol. IV	OH	110.000	
	Uang Saku Gol. III	OH	90.000	
	Uang Saku Gol. II/I	OH	80.000	
	<b>c. 15 hari s/d 30 hari</b>			
	Uang Saku Gol. IV	OH	75.000	
	Uang Saku Gol. III	OH	63.000	
	Uang Saku Gol. II/I	OH	51.000	
	<b>d. 31 hari s/d 60 hari</b>			
	Uang Saku Gol. IV	OH	50.000	
	Uang Saku Gol. III	OH	42.000	
	Uang Saku Gol. II/I	OH	34.000	
	<b>e. 61 hari s/d 90 hari</b>			
	Uang Saku Gol. IV	OH	40.000	
	Uang Saku Gol. III	OH	33.000	
	Uang Saku Gol. II/I	OH	26.000	
	<b>f. 91 hari s/d 120 hari</b>			
	Uang Saku Gol. IV	OH	35.000	
	Uang Saku Gol. III	OH	28.000	
	Uang Saku Gol. II/I	OH	22.000	

KODE REKENING	URAIAN	KETERANGAN		
		SATUAN	HARGA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
	<b>3. Di luar Wilayah Provinsi Jatim</b>			
	<b>a. 1 hari s/d 7 hari</b>			
	<i>Uang Saku Gol. IV</i>	OH	500.000	
	<i>Uang Saku Gol. III</i>	OH	400.000	
	<i>Uang Saku Gol. II/I</i>	OH	350.000	
	<b>b. 8 hari s/d 14 hari</b>			
	<i>Uang Saku Gol. IV</i>	OH	300.000	
	<i>Uang Saku Gol. III</i>	OH	266.000	
	<i>Uang Saku Gol. II/I</i>	OH	232.000	
	<b>c. 15 hari s/d 30 hari</b>			
	<i>Uang Saku Gol. IV</i>	OH	160.000	
	<i>Uang Saku Gol. III</i>	OH	141.000	
	<i>Uang Saku Gol. II/I</i>	OH	122.000	
	<b>d. 31 hari s/d 60 hari</b>			
	<i>Uang Saku Gol. IV</i>	OH	90.000	
	<i>Uang Saku Gol. III</i>	OH	79.000	
	<i>Uang Saku Gol. II/I</i>	OH	68.000	
	<b>e. 61 hari s/d 90 hari</b>			
	<i>Uang Saku Gol. IV</i>	OH	70.000	
	<i>Uang Saku Gol. III</i>	OH	61.000	
	<i>Uang Saku Gol. II/I</i>	OH	52.000	
	<b>f. 91 hari s/d 120 hari</b>			
	<i>Uang Saku Gol. IV</i>	OH	57.000	
	<i>Uang Saku Gol. III</i>	OH	49.000	
	<i>Uang Saku Gol. II/I</i>	OH	41.000	
5.2.2.17.04.	<b>Belanja Kontribusi Pameran</b>			
	<i>a. Petugas jaga pameran luar kota</i>	OH	100.000	
	<i>b. Petugas jaga pameran</i>	OH	75.000	

Beberapa Satuan Standart Harga yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini bisa menyesuaikan dengan harga pasar.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN**

#### **1. Penyusunan RKA-SKPD**

1. Substansi Peraturan Bupati Gresik tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan APBD Tahun 2014, memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD serta batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
2. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD;
3. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **2. Bantuan Hibah**

1. Tanggungjawab baik administrasi (pelaporan, penggunaan keuangan maupun fisik berada sepenuhnya kepada penerima bantuan hibah);
2. Sifat bantuan tidak harus terus menerus/mengikat setiap tahun anggaran tergantung dari kemampuan penganggaran/APBD;
3. Penyelesaian pelaksanaan bantuan hibah tidak harus pada berakhirnya tahun anggaran tetapi tergantung dari Nota Perjanjian Hibah Daerah.

#### **3. Honorarium Tim/Panitia pelaksana atau Standart Honorarium/Upah/Ongkos**

- Tim/Panitia pelaksana kegiatan (PNS dan Non PNS) dapat diberikan honor dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Surat Keputusan Kepala SKPD;
- Ketentuan pembentukan Tim adalah sebagai berikut:
  - a. Mempunyai keluaran jelas dan terukur;
  - b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Kepala SKPD dan dapat melibat Pejabat Eselon II lainnya;
  - c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
  - d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari;
  - e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

- Honorarium bagi PNS maupun non PNS dibatasi sesuai dengan tingkat kewajiban dan beban tugas;
- Seseorang yang ditugaskan pada 1 (satu) kegiatan perbulannya hanya boleh menerima satu honorarium saja, dengan batasan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan secara wajar, namun kepada yang bersangkutan masih dapat diberikan biaya operasional untuk kegiatan yang dilakukannya *seperti uang transport, lembur, uang sidang dan sejenisnya*;
- Pelampauan honorarium batas maksimal harus berdasarkan Keputusan Bupati, namun harus berdasarkan azas kewajiban, kepatutan dan harus mendapat rekomendasi dari Pejabat Pengelola Keuangan.

#### **4. Honorarium penyuluh Non Pegawai Negeri**

Honorarium diberikan kepada non Pegawai negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

#### **5. Honorarium Rohaniwan**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan, honorarium tersebut sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan.

#### **6. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis**

##### **a. Honorarium Narasumber/Pembahas.**

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

Honorarium narasumber pegawai negeri/non pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan berasal dari luar lingkup SKPD

##### **b. Honorarium moderator**

Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis.

Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi/focus group discussion/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar atau sejenisnya setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.

##### **c. Uang sidang/rapat.**

Kegiatan workshop, sosialisasi, desiminasi, rapat teknis atau rapat sejenis yang serupa maka para peserta PNS dapat diberikan uang rapat perorangan perhari sepanjang kegiatan tersebut bersifat antar SKPD atau antar bagian dilingkungan Sekretariat Daerah.

## **7. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**

- a. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil/non PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat berwenang;
- b. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari;
- c. Pada hari kerja, batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari;
- d. Pembayaran uang lembur dan uang makan dikenakan PPh pasal 21.

## **8. Satuan Biaya Konsumsi Rapat**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.

## **9. Satuan biaya uang rapat diluar kantor**

Uang rapat di luar kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan diluar kantor (*fullboard, fullday dan halfday*), uang saku rapat dapat dibayarkan sepanjang:

- a. Melibatkan peserta dari eselon II/masyarakat;
- b. Dilaksanakan minimal 4 jam diluar jam kerja;
- c. Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- d. Dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/Kepala SKPD;
- e. Surat Tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/Kepala SKPD;
- f. Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/Kepala SKPD).

### **Catatan :**

- a. Uang rapat di luar kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah dipenuhi.
- b. Satuan biaya uang rapat didalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

## **10. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural**

Satuan biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjurangan bagi pejabat/pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

## 11. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

## 12. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.

Pengelola Keuangan pada setiap SKPD, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA-SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terdapat yang kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan mengacu pada honorarium staf Pengelola Keuangan sesuai dengan dana yang dikelolanya atau nilai anggaran belanja langsung;
- b. Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD, Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan diberikan honorarium sesuai nilai anggaran dari target Pendapatan.

## 13. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan **per bulan** Rp.300.000,- bila pagu anggaran s/d Rp. 50.000.000,- sedangkan honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan **per paket** Rp.300.000,- bila pagu anggarannya diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-.
- c. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).  
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia

Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling sedikit 3 (tiga) orang.

d. Honorarium Anggota Sekretariat ULP.

Honorarium diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Bupati Gresik menjadi Anggota Sekretariat ULP. Pengaturan Honorarium Anggota Sekretariat ULP disamakan sebagaimana yang diatur pada Belanja Pegawai di Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan.

**Catatan:**

Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional, maka pemberian honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

#### **14. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan.**

- a) Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan **per bulan** Rp.300.000,- bila pagu anggaran s/d Rp. 50.000.000,-, sedangkan honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan **per paket** Rp.300.000,- bila pagu anggarannya di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp.200.000.000;
- b) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berjumlah 1 (satu) orang untuk pekerjaan:
- Pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan *nilai paling tinggi* Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Jasa Konsultansi dengan *nilai paling tinggi* Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c) Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah 3 (tiga) orang untuk pekerjaan:
- Pengadaan Barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan *nilai di atas* Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Jasa Konsultansi dengan *nilai di atas* Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

#### **15. Honorarium Pengelola Barang.**

Honorarium Pengelola Barang diberikan kepada pegawai di lingkungan SKPD yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus/Penyimpan Barang/Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah honor pengelola barang dihitung dengan nilai aset yang dikelola masing-masing SKPD.

## **16. Honorarium Tim Penyusun Jurnal.**

Honorarium Tim Penyusun Jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi sendiri.

## **17. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan.**

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang terdiri dari pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasaan, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa.

Terhadap pembantu peneliti/perekayasa sebagaimana tersebut di atas yang berstatus Pegawai Negeri tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

1. Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri (non fungsional peneliti/perekayasa), kepada pegawai negeri (non fungsional peneliti/perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja norma diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama;
2. Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

## **18. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.**

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya, sekurang-kurangnya dihadiri peserta Eselon II lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

### **a. Paket *Fullboard***

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standart sound system, warles, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen);

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standart sound system, warles, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen);

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar selama setengah hari minimal 4 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali siang, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standart sound system, warles, mikropon, alat tulis, air mineral dan permen).

**Catatan:**

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, maka untuk seluruh pejabat/pegawai negeri dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai negeri;
- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - Pejabat Eselon IIa keatas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang
  - Pejabat Eselon IIb kebawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Keiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota
  - 1). Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas : Indeks paket pertemuan (*fullboard/fullday/halfday*), uang saku dan biaya transpotasi dakam kota;
  - 2). Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-SKPD terdiri atas: biaya transpotasi yang diberikan secara *at cost*, indeks paket pertemuan *fullboard*, dan uang harian paket *fullboard* di luar kota.
- d. Besaran uang saku untuk kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor ditetapkan sebagaimana tercantum pada Bab. III;
- e. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas.

## **19. Perjalanan Dinas Jabatan**

- 19.1 Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (melaksanakan tugas) dan kembali ke tempat kedudukan semula.

## 19.2 Prinsip Perjalanan Dinas

1. Selektif untuk kepentingan yang prioritas terkait penyelenggaraan pemerintah;
2. Tersedianya anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja;
3. Efisien; dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya.

## 19.3 Komponen Perjalanan Dinas sesuai Permendagri No. 16 Tahun 2013

### 1. *Uang Harian* yang meliputi:

- Uang makan;
- Uang saku;
- Uang transport lokal.

Dibayarkan secara lumpsump dan merupakan batas tertinggi (sesuai banyak hari yang digunakan);

### 2. *Transportasi*

- a. Transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan, termasuk biaya ke terminal/stasiun/bandara pelabuhan;
- b. Retribusi;
- c. Dibayarkan secara At Cost (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

### 3. *Penginapan*

- a. Hotel;
- b. Tempat menginap lainnya, diberi 30% dari tarif hotel;
- c. Dibayarkan sesuai dengan At Cost (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

### 4. *Representasi*

- a. Diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan II, selama melaksanakan perjalanan dinas atau yang disetelarkan.
- b. Dibayarkan secara lumpsump dan merupakan batas tertinggi.

### 5. *Sewa Kendaraan*

- a. Khusus Pejabat Negara;
- b. Sewa termasuk BBM, sopir dan pajak;
- c. Dibayarkan secara At Cost (biaya riil sesuai tanda bukti yang sah).

### 6. *Antar jemput jenazah*

- a. Biaya meliputi biaya menjemput/mengantar, pemetian dan angkutan jenazah;
- b. Dibayarkan secara lumpsump (sesuai tingkat dan tarif angkutan).

## 19.4 Pelaksana Perjalanan Dinas

1. Pejabat Negara;
2. Pegawai Negeri meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Calon PNS;
  - c. TNI dan POLRI.

3. Pihak lainnya  
Honorar, pihak ketiga, masyarakat dll.
  4. Pegawai Tidak Tetap.
- 19.5 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, Yaitu :
1. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Wakil Menteri Pejabat setingkat Menteri), Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara;
  2. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat lainnya yang setara;
  3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
- 19.6 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP).  
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

**KLARIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DIATUR SEBAGAI BERIKUT:**

No.	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/ Bus	Lainnya
1.	Bupati, Ketua DPRD	B	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif	sesuai kenyataan
2.	Wakil Bupati, Wk. Ketua DPRD	B	Bisnis	Kelas IB	Eksekutif	
3.	Eselon II, Anggota DPRD	C	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	
4.	Eselon III	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5.	Eselon IV	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
6.	Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
7.	Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
8.	Gol. II/TKM	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	

**PERKIRAAN SATUAN BIAYA  
PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	PEJABAT NEGARA	TARIF HOTEL			GOL. I/II
				PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III/GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III	
1.	A C E H	OH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.206.000	703.000	470.000	310.000
3.	R I A U	OH	3.817.000	1.168.000	720.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5.	J A M B I	OH	4.000.000	1.030.000	697.000	370.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.144.000	884.000	460.000	370.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.228.000	602.000	514.000	280.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.299.000	770.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.858.000	1.150.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	OH	3.808.000	1.430.000	1.024.000	556.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.664.000	1.753.000	949.000	497.000	463.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.146.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	387.000
16.	<b>JAWA TIMUR</b>	<b>OH</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>841.000</b>	<b>485.000</b>	<b>286.000</b>
17.	B A L I	OH	4.881.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18.	N T B	OH	3.429.000	1.222.000	737.000	540.000	360.000
19.	N T T	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	550.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	808.000	430.000	330.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	465.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.603.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.553.000	640.000	500.000	290.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.030.000	853.000	539.000	375.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.135.000	767.000	400.000	330.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.298.000	802.000	450.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.070.000	680.000	484.000	280.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
33.	PAPUA	OH	2.850.000	1.524.000	720.000	460.000	414.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.482.000	900.000	400.000	370.000

Keterangan : Akomodasi bisa memakai kelas (bintang) di atasnya selama tidak melampaui standar harga tersebut dalam tabel diatas.

**20. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri**

Satuan biaya uang perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klarifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A : Pimpinan Lembaga Pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pejabat Eselon I;
- b. Golongan B : Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II dan pejabat lainnya yang setara;

- c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b;
- d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud huruf B dan huruf C.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh: Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

### Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
1.	Amerika Serikat	527	473	417	343
2.	Kanada	447	404	368	307
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
3.	Argentina	395	277	242	241
4.	Venezuela	464	323	287	286
5.	Brasil	436	341	291	241
6.	Chile	415	316	270	222
7.	Columbia	386	281	240	221
8.	P e r u	383	277	237	221
9.	Suriname	398	295	252	207
10.	Ekuador	385	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>				
11.	Mexico	429	318	282	281
12.	K u b a	406	305	261	221
13.	Panama	414	307	272	271
	<b>EROPA BARAT</b>				
14.	Austria	504	453	318	317
15.	Belgia	466	419	282	281
16.	Prancis	512	464	382	381
17.	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18.	Belanda	463	416	272	271
19.	Swiss	509	456	322	321
	<b>EROPA UTARA</b>				
20.	Denmark	472	427	275	241
21.	Firlandia	453	409	354	313
22.	Norwegia	517	465	288	286
23.	Swedia	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	<b>EROPA SELATAN</b>				
25.	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26.	Kroasia	483	444	353	352
27.	Spanyol	457	413	287	286
28.	Yunani	422	379	242	241
29.	Italia	520	472	372	371
30.	Portugal	425	382	242	241
31.	Serbia	401	361	313	277

NO.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	<b>EROPA TIMUR</b>				
32.	Bulgaria	406	367	320	284
33.	Czech	426	390	331	293
34.	Hongaria	421	381	339	300
35.	Polandia	401	361	313	277
36.	Rumania	416	381	313	277
37.	Rusia	556	512	407	406
38.	Slovakia	429	387	335	297
39.	Ukrania	425	382	328	290
	<b>AFRIKA BARAT</b>				
40.	Nigeria	361	313	292	291
41.	Senegal	334	276	206	201
	<b>AFRIKA TIMUR</b>				
42.	Ethiopia	312	257	192	167
43.	Kenya	334	276	206	196
44.	Madagaskar	296	244	182	181
45.	Tanzania	330	272	203	182
46.	Zimbabwe	285	244	216	215
47.	Mozambique	319	263	212	211
	<b>AFRIKA SELATAN</b>				
48.	Namibia	300	247	185	161
49.	Afrika Selatan	304	251	202	201
	<b>AFRIKA UTARA</b>				
50.	Aljazair	342	308	287	286
51.	Mesir	368	273	212	190
52.	Maroko	304	251	192	191
53.	Tunisia	293	241	187	186
54.	Sudan	342	282	210	184
55.	Libya	308	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>				
56.	Azerbaijan	498	459	365	364
57.	Bahrain	405	286	222	208
58.	Irak	397	283	220	201
59.	Yordania	365	254	197	196
60.	Kuwait	406	283	257	256
61.	Libanon	357	267	207	186
62.	Qatar	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	358	257	200	196
64.	Turki	365	270	210	188
65.	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66.	Yaman	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	391	276	215	201
68.	Kesultanan Oman	359	254	197	185

(dalam US\$)

NO.	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	<b>ASIA TIMUR</b>				
69.	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70.	Hongkong	472	320	287	286
71.	Jepang	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	421	326	297	296
73.	Korea Utara	395	238	207	206
	<b>ASIA SELATAN</b>				
74.	Afganistan	385	226	173	172
75.	Banglades	339	196	167	166
76.	India	352	263	242	241
77.	Pakistan	343	203	182	181
78.	Srilangka	348	201	167	166
79.	Iran	351	260	202	181
	<b>ASIA TENGAH</b>				
80.	Uzbekistan	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
82.	Philipina	412	278	222	221
83.	Singapura	424	290	224	221
84.	Malaysia	381	253	212	211
85.	Thailand	392	275	211	201
86.	Myanmar	368	250	197	196
87.	Laos	380	262	202	196
88.	Vietnam	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90.	Kamboja	296	223	197	196
91.	Timor Leste	392	354	229	196
	<b>ASIA Pasifik</b>				
92.	Australia	439	403	272	271
93.	Selandia Bsru	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	385	353	237	192
96.	F i j i	363	329	221	179

**BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BELANJA MODAL NON KONSTRUKSI  
DAN KONSULTASI NON KONSTRUKSI**

(dalam ribuan rupiah)

BIAYA MODAL NON KONSTRUKSI DAN KONSULTASI NON KONSTRUKSI	PAGU	BIAYA PENGELOLAAN/ BOP	PROSENTASE
1	2	3	4
100.000,00	119.350,00	19.350,00	18,33
250.000,00	298.375,00	48.375,00	16,21
500.000,00	573.100,00	73.100,00	12,76
750.000,00	843.825,00	93.825,00	11,12
1.000.000,00	1.106.500,00	106.500,00	9,62
1.250.000,00	1.376.125,00	126.125,00	9,17
1.500.000,00	1.642.950,00	142.950,00	8,70
1.750.000,00	1.906.975,00	156.975,00	8,23
2.000.000,00	2.169.400,00	169.400,00	7,81
2.250.000,00	2.429.325,00	179.325,00	7,38
2.500.000,00	2.686.750,00	186.750,00	6,95

**Catatan :**

Untuk kegiatan yang mempunyai nilai pagu diantara nilai yang tertera dalam tabel diambil dengan interpolasi diurutan nilai tersebut.

*Yang dimaksud Biaya Pengelolaan adalah* Biaya Administrasi Proyek, Proses Pengadaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.

Dalam Penganggarannya dihitung berdasarkan perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil. Biaya langsung non personil pada **prinsipnya tidak melebihi 40%** (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus, seperti : pekerjaan penilaian aset, survey untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survey lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain

**21. Standar Harga Bangunan**

Dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik.

21.1 Untuk Bangunan bertingkat perhitungan yang dipakai adalah sebagai berikut:

- Lantai 1 = 1,000 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 2 = 1,090 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 3 = 1,120 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 4 = 1,135 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 5 = 1,162 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 6 = 1,197 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 7 = 1,236 x standar harga bangunan bertingkat
- Lantai 8 = 1,265 x standar harga bangunan bertingkat

Harga satuan tertinggi rata-rata per M<sup>2</sup> bangunan/ruang dengan fungsi khusus untuk bangunan Gedung Negara.

Untuk ruang dengan fungsi tertentu, yang memerlukan standar harga yang khusus, agar pada tahap penyusunan anggaran berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat.

- 21.2 Untuk bangunan/ruang yang mempunyai fungsi khusus, yang karena persyaratannya memerlukan penyelesaian khusus, harga satuan tertinggi untuk per-m<sup>2</sup> nya didasarkan pada harga satuan tertinggi untuk klasifikasi bangunan yang bersangkutan setelah dikalikan koefisien seperti berikut :

- ICU/ICCU/UGD/CMU = 1.50 x standar harga bangunan
- Ruang Operasi = 2.00 x standar harga bangunan
- Ruang Radiology = 1.25 x standar harga bangunan
- Rawat inap = 1.10 x standar harga bangunan
- Laboratorium = 1.10 x standar harga bangunan
- Ruang Kebidanan & Kandungan = 1.20 x standar harga bangunan
- Ruang Gawat Darurat = 1.10 x standar harga bangunan
- Power House = 1.25 x standar harga bangunan
- Ruang Rawat Jalan = 1.10 x standar harga bangunan
- Dapur dan Laundri = 1.10 x standar harga bangunan
- Bengkel = 1.00 x standar harga bangunan
- Lab. SLTP/SMA/SMK = 1.15 x standar harga bangunan
- Selasar Luar Beratap/Teras = 0.50 x standar harga bangunan

- 21.3 Biaya Komponen Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang *biaya konstruksi fisiknya dibawah Rp. 250.000.000* (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka ditentukan untuk:

- a. Biaya Administrasi Proyek sebesar 5 % (dua persen)
- b. Biaya Pengawasan sebesar 4 % (empat persen)
- c. Biaya perencanaan sebesar 7 % (tujuh persen)
- d. Biaya Fisik sebesar 84 % (delapan puluh tujuh persen)

**EKIVALENSI TENAGA AHLI YANG DISYARATKAN DENGAN TENAGA AHLI  
DENGAN SATUAN ORANG BULAN**

NO	PENDIDIKAN TENAGA AHLI	S-1		S-2/S-3	
	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/ BULAN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH/ BULAN
1.	AHLI PRATAMA	1	8.015.000		
		2	8.906.000		
		3	9.796.000		
		4	10.687.000		
2.	AHLI MUDA	5	11.649.000	1	12.237.000
		6	12.646.000	2	13.341.000
		7	13.644.000	3	14.445.000
		8	14.641.000	4	15.550.000
3.	AHLI MADYA	9	15.603.000	5	16.618.000
		10	16.583.000	6	17.705.000
		11	17.562.000	7	18.791.000
		12	18.542.000	8	19.878.000
4.	AHLI UTAMA	13	19.557.000	9	21.000.000
		14	20.537.000	10	22.104.000
		15	21.517.000	11	23.209.000
		16	22.496.000	12	24.313.000
5.	AHLI KEPALA	17	23.458.000	13	25.328.000
		18	24.438.000	14	26.415.000
		19	25.417.000	15	27.501.000
		20	26.397.000	16	28.588.000
6.	AHLI PEMBINA KEPALA			17	29.710.000
				18	30.796.000
				19	31.883.000
				20	32.970.000

**DAFTAR STANDART TENAGA TEKNISI KOMPUTER DAN  
TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI**

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>
<b>I.</b>	<b>TENAGA TEKNISI KOMPUTER</b>		
	1. Documentator	OB	2.670.000
	2. Designer	OB	5.340.000
	3. Tenaga Data Entry	OH	75.000
	4. Programmer Senior	OB	5.340.000
	5. Programmer Yuniior	OB	1.602.000
	6. Sistem Analisis	OB	7.476.000
	7. Sistem Analisis dan Designer	OB	7.476.000
	8. Tenaga Instalasi Jaringan	OH	80.100
	9. Tenaga Programmer	OH	80.100
	10. Tenaga Teknisi Hardware	OH	116.000
	11. Tenaga Teknisi Hardware	OB	3.500.000
	12. Tester	OB	5.340.000
	13. Implementator	OB	5.340.000
<b>II.</b>	<b>TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI</b>		
	1. Juru Gambar	OB	1.335.000
	2. Office Manager	OB	2.403.000
	3. Operator Komputer	OB	1.068.000
	4. Sekretaris	OB	1.068.000
	5. Sekretaris Bilingual	OB	1.068.000
	6. Sopir Truk	OH	53.400
	7. Sopir Skywalker	OH	53.400
	8. Staf Adminstrasi	OH	53.400
	9. Petugas Sampling Air Laut	OH	801.000
	10. Manager TIM	OB	7.476.000

## TAHAPAN DAN PENJADWALAN PENYUSUNAN RKA 2014

NO.	KEGIATAN	WAKTU	KET.
1.	Penetapan dan penyampaian Pedoman Penyusunan RKA SKPD	1 Agustus 2013	
2.	Proses penyusunan RKA di SKPD dan Input data di SIPKD	1 Agustus s/d 27 September 2013	
3.	Verifikasi RKA oleh Tim Verifikasi Anggaran Pemerintah Daerah dan TAPD	30 September s/d 18 Oktober 2013	
4.	Penyiapan dokumen Raperda RAPBD dan Raperbup penjabaran	21 - 25 Oktober 2013	
5.	Pengiriman Raperda APBD dan Raperbup ke DPRD disertai lampiran dan Penyampaian Nota Keuangan oleh Bupati	28 Oktober 2013	
6.	Pembahasan RAPBD di DPRD/ Komisi dan persetujuan bersama	1 - 30 November 2013	
7.	Penyampaian RAPBD dan Evaluasi Gubernur	5 - 20 Desember 2013	
8.	Penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Provinsi	24 Desember 2013	
9.	Penetapan Perda APBD 2014	27 Desember 2013	

Jadwal dapat berubah menyesuaikan dengan kegiatan TAPD dan DPRD.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dapat diberlakukan sebagai pelengkap pedoman ini.

Ditekankan bagi para pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa sepanjang tidak ada aturan lain yang lebih tinggi didalam pengaturan pelaksanaan administrasinya, maka Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini wajib untuk dilaksanakan.

Mengenai hal-hal yang penanganannya memerlukan perlakuan khusus akan diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

Demikian buku pedoman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., MSi**